Pencapaian

1 TAHUN KERJA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

DARI AKAR NUSANTARA MENUJU PANGGUNG DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

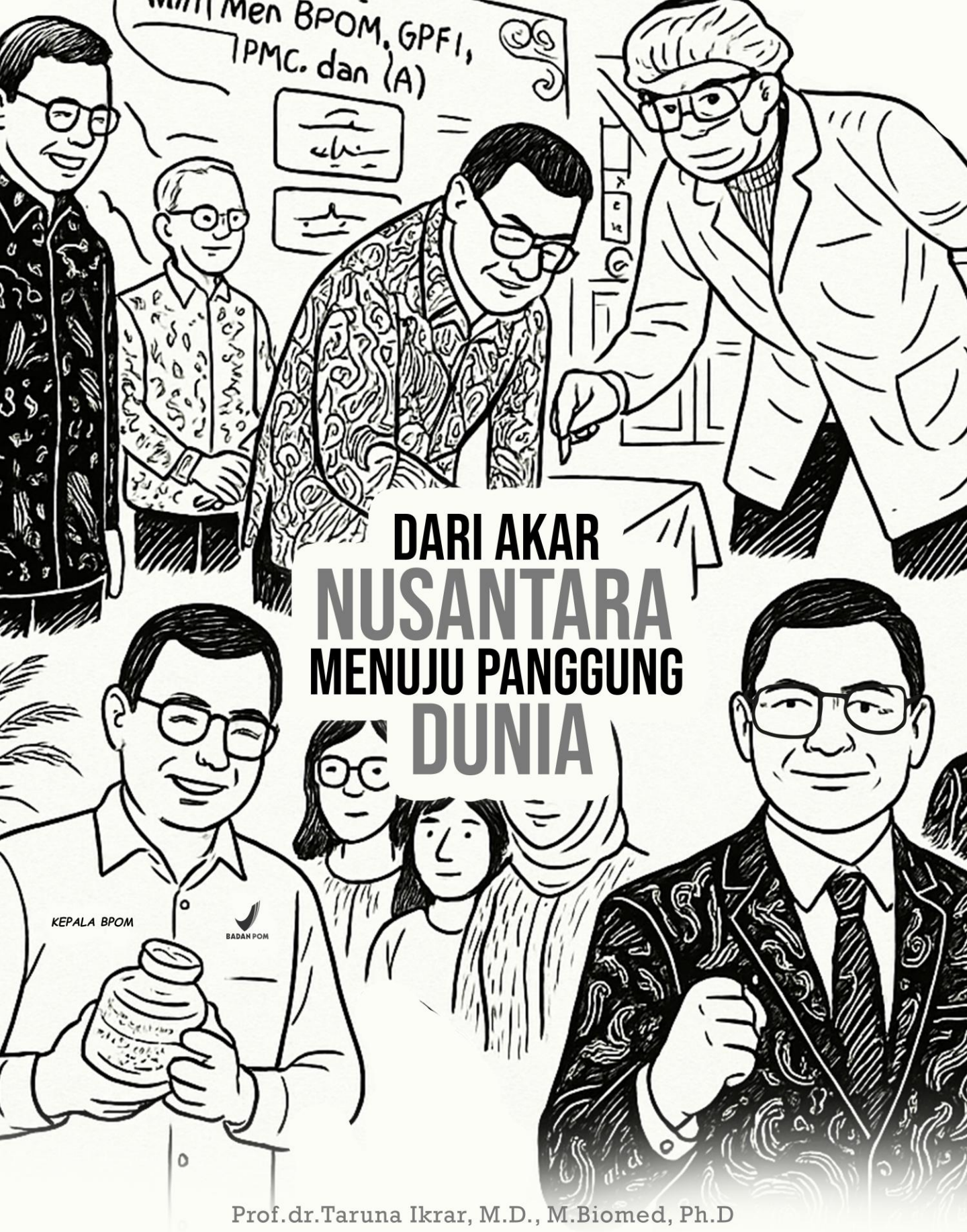

DARI AKAR NUSANTARA MENUJU PANGGUNG DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

PENDAHULUAN

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama: pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga pilar ini bekerja sama untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Pilar pertama adalah pelaku usaha, yang mencakup produsen, distributor, dan pengecer. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan dan edarkan aman dikonsumsi masyarakat. Untuk itu, pelaku usaha diwajibkan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif, seperti Good Manufacturing Practice (GMP) yang diakui secara internasional.

Pilar kedua adalah pemerintah sebagai regulator, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara luas dan kompleks. Saat ini, BPOM mengoperasikan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 42 Balai Besar/Balai POM di ibu kota provinsi dan 34 Loka POM di kabupaten/kota. UPT tersebut dilengkapi dengan laboratorium modern yang mampu melakukan pengujian produk secara akurat dan valid. Jaringan ini menjadi tulang punggung pengawasan obat dan makanan nasional.

Pilar ketiga adalah masyarakat sebagai konsumen atau pengguna akhir. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan, terutama melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan produk yang dikonsumsi.

Saat ini, tantangan dalam pengawasan obat dan makanan semakin kompleks. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat melantik dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. sebagai Kepala BPOM RI pada 19 Agustus 2024, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/PPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BPOM.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden menyampaikan lima arahan strategis kepada BPOM, yaitu:

Memastikan seluruh produk makanan yang beredar di Indonesia aman, bergizi, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.
- Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan.
- Mendukung kemandirian penyediaan obat dalam negeri dan mempermudah akses masyarakat terhadap obat yang dibutuhkan.
- Mempercepat proses uji klinik hingga rilis obat untuk digunakan oleh masyarakat.
- Meningkatkan reputasi Indonesia melalui peran BPOM sebagai regulator obat dan makanan yang diakui secara global.

Selain kelima arahan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya kemudahan akses terhadap obat-obatan esensial, upaya penurunan harga obat agar lebih terjangkau, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan nasional.

Kini, 200 hari telah berlalu sejak pelantikan Kepala BPOM. Meski 200 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai seluruh capaian, periode ini kerap digunakan sebagai tolok ukur awal untuk menilai arah kebijakan dan kinerja pimpinan baru. Evaluasi ini penting sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas, serta untuk memastikan pelaksanaan arahan Presiden telah berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan hal tersebut, diterbitkanlah buku Pencapaian Kinerja 200 Hari Kepala BPOM 2024 – Taruna Ikrar. Buku ini memuat rangkuman kegiatan, capaian, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kepala BPOM selama 200 hari pertama masa jabatannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran BPOM dan para mitra kerja atas dukungan dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat sebagai referensi untuk memperkuat kinerja BPOM ke depan, dalam rangka melindungi masyarakat serta meningkatkan peran BPOM sebagai regulator pengawasan obat dan makanan yang kredibel, berintegritas, dan profesional hingga di tingkat global.

Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat terus hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat dari waktu ke waktu, dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan manfaat obat dan makanan, sejak sebelum proses produksi hingga produk tersebut beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, baik dari aspek eksternal maupun internal, BPOM senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan inovasi serta pendekatan baru guna mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan ke depan. Upaya ini dilakukan agar BPOM tidak terjebak dalam rutinitas atau pola business as usual, melainkan terus berkembang menjadi lembaga yang profesional, kredibel, dan independen. Harapan besar inilah yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengacu pada arahan Presiden, tugas birokrasi tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pembelanjaan anggaran, serta pelaporan akuntabilitas. Lebih dari itu, Presiden menekankan bahwa hasil kerja birokrasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata, termasuk di sektor obat dan makanan.

Laporan ini, Laporan Kinerja 200 Hari Kepala BPOM, memuat berbagai capaian kinerja serta perkembangan dan inovasi yang telah dilaksanakan selama periode September 2024 hingga Mei 2025. Beberapa aspek penting yang menjadi sorotan dalam laporan ini meliputi: implementasi direktif Presiden, percepatan pelayanan publik, penguatan penindakan, perumusan Grand Design Laboratorium, serta pengembangan kerja sama lintas sektor.

Melalui laporan ini, BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan pembenahan dan perbaikan secara berkelanjutan. Ikhtiar tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja unggul yang didasarkan pada hasil pengawasan serta umpan balik dari masyarakat untuk mengetahui dampak dan manfaat nyata dari keberadaan BPOM.

Sebagai bagian dari kesiapan menghadapi masa depan, BPOM telah menetapkan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan 2025–2045 yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menempatkan BPOM sebagai lembaga yang menjulang di kancah internasional, membumi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mengakar kuat dalam mendukung pembangunan nasional.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh jajaran BPOM yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mewujudkan berbagai capaian dalam 200 hari pertama masa kepemimpinan saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para mitra BPOM yang telah mendukung dan bersinergi dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat, sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang demi melindungi kesehatan masyarakat dan memperkuat daya saing bangsa.

Jakarta, Juni 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

TARUNA IKRAR

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi Direktif Presiden oleh BPOM

1. Penguatan Standar Global: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan arahan Presiden melalui berbagai langkah strategis yang menyeluruh. Salah satu langkah penting adalah mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam forum Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), sebuah organisasi internasional di bidang pengawasan farmasi. Untuk itu, BPOM melakukan reassessment dengan mengintegrasikan sistem mutu pengawasan, melakukan simulasi inspeksi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarinspektur. Upaya ini memperkuat posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang memenuhi standar global.

2. Percepatan Akses Obat: Dalam mendukung percepatan akses dan penurunan harga obat, BPOM melakukan berbagai inovasi, seperti peluncuran kegiatan kick-off registrasi ulang obat generik, yang menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Hingga akhir 2024, BPOM telah menyelesaikan 915 nomor izin edar yang masa berlakunya telah habis. Selain itu, melalui program "FAST", BPOM mempercepat registrasi perubahan sumber bahan baku garam farmasi lokal guna meningkatkan kemandirian industri obat nasional. Upaya ini dilengkapi dengan pengembangan fitofarmaka melalui kolaborasi riset, industri, dan akademisi untuk menghadirkan produk berbahan alam yang terstandarisasi dan terjangkau.

3. Kemandirian Bahan Baku: Kemandirian bahan baku obat juga menjadi perhatian penting. Melalui peluncuran AIRINDO, pelatihan kepada pemasok bahan baku, serta kolaborasi lintas sektor, BPOM mendorong ketersediaan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Fokus ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam.

4. Penjaminan Keamanan Farmasi dan Pangan: Dalam hal penjaminan sediaan farmasi dan pangan yang aman, BPOM memperkuat pengawasan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur melalui FOKKUS KEK. Selain itu, pengendalian resistensi antimikroba menjadi prioritas utama dengan pelibatan lintas sektor dan edukasi publik. BPOM juga memperkenalkan program "PESONA" untuk memperkuat manajemen risiko pada produk obat bahan alam dan menyelenggarakan SEMARAK Kosmetik guna mendorong inovasi dan kolaborasi industri kosmetik.

5. Pengawasan Kosmetik Ilegal: Pengawasan terhadap kosmetik ilegal juga ditingkatkan, di mana BPOM menemukan puluhan produk yang mengandung bahan berbahaya. Sementara itu, melalui Cosmetic Toll Manufacturer Expo, BPOM memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memproduksi kosmetik dengan merek sendiri melalui kontrak produksi.

6. Dukungan Daya Saing Produk Pangan: Untuk memperkuat daya saing pangan olahan nasional, BPOM memberikan pendampingan bagi produsen dalam menghadapi tantangan ekspor, serta memperkenalkan Program Manajemen Risiko (PMR) untuk pangan non-risiko tinggi, yang bertujuan meningkatkan efektivitas sistem keamanan pangan nasional.

7. Percepatan Perizinan Obat Inovatif: Dalam hal percepatan perizinan obat inovasi, BPOM berhasil menerbitkan izin edar obat Fezolinetant dalam waktu 54 hari kerja melalui mekanisme reliance. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Penilai Obat 2025–2029 memperkuat kapasitas evaluasi khasiat dan keamanan obat secara ilmiah dan independen.

Secara keseluruhan, berbagai langkah BPOM ini menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan mandat Presiden, mempercepat akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, serta memperkuat kemandirian dan daya saing sektor kesehatan dan pangan nasional di kancah global.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

1. Percepatan Pelayanan Publik. BPOM terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk obat tradisional dan obat bahan alam (OBA). Melalui program "Gemilang Indonesia Emas", BPOM mendukung literasi kesehatan digital dan pengembangan UMKM di sektor OBA. Peningkatan layanan ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis, percepatan sertifikasi, serta pendampingan ekspor. Layanan jemput bola juga diperkuat melalui "Proaksi Berpadu", yang telah memberikan pendampingan kepada ribuan pelaku usaha dan menghasilkan puluhan ribu nomor izin edar. Pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA juga diperkuat untuk mendukung transformasi OBA menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. BPOM juga mempercepat penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas, memberikan asistensi regulatori bagi pelaku industri distribusi obat, serta mendorong kepatuhan regulasi melalui sertifikasi CDOB.

2. Penguatan Penindakan. Dalam rangka memberantas peredaran produk ilegal, BPOM meningkatkan pengawasan melalui patroli siber dan pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital. Kerja sama lintas sektor dengan e-commerce dan asosiasi juga dilakukan untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal. BPOM juga memetakan data kerawanan kejahatan obat dan makanan untuk memperkuat upaya cegah tangkal serta melakukan analisis mendalam terhadap tren pelanggaran.

RINGKASAN EKSEKUTIF

3. Grand Design Laboratorium. BPOM meluncurkan grand design penguatan laboratorium sebagai fondasi sistem pengawasan yang adaptif dan modern. Langkah ini mencakup pengembangan jejaring laboratorium OBA dan kosmetik, pembentukan laboratorium regional di Jayapura, serta penguatan metode analisis dan layanan digital seperti INFALABS. Laboratorium BPOM juga kini mendukung pengawasan terhadap produk ATMPs dan berperan aktif dalam pengakuan laboratorium eksternal.

4. Kerja Sama Lintas Sektor. Untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan kolaboratif, BPOM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Sinergi dilakukan dengan BRIN dan Kemenkes untuk penguatan uji klinik nasional, dengan IPB dalam bidang penelitian dan edukasi, serta dengan BSSN dan BIN dalam hal keamanan siber. Di sisi masyarakat, BPOM melanjutkan program Germas Sapa yang menyatukan berbagai inisiatif pangan aman berbasis komunitas. Secara keseluruhan, berbagai langkah strategis dalam BAB II menunjukkan komitmen BPOM dalam memperkuat peran dan kapabilitasnya sebagai lembaga pengawasan yang modern, inklusif, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

5. Percepatan Pelayanan Publik. BPOM terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya untuk obat tradisional dan obat bahan alam (OBA). Melalui program "Gemilang Indonesia Emas", BPOM mendukung literasi kesehatan digital dan pengembangan UMKM di sektor OBA. Peningkatan layanan ini diwujudkan dalam bentuk bimbingan teknis, percepatan sertifikasi, serta pendampingan ekspor. Layanan jemput bola juga diperkuat melalui "Proaksi Berpadu", yang telah memberikan pendampingan kepada ribuan pelaku usaha dan menghasilkan puluhan ribu nomor izin edar. Pendampingan penelitian uji praklinik/klinik OBA juga diperkuat untuk mendukung transformasi OBA menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. BPOM juga mempercepat penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas, memberikan asistensi regulatori bagi pelaku industri distribusi obat, serta mendorong kepatuhan regulasi melalui sertifikasi CDOB.

6. Penguatan Penindakan. Dalam rangka memberantas peredaran produk ilegal, BPOM meningkatkan pengawasan melalui patroli siber dan pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital. Kerja sama lintas sektor dengan e-commerce dan asosiasi juga dilakukan untuk mempersempit ruang distribusi produk ilegal. BPOM juga memetakan data kerawanan kejahatan obat dan makanan untuk memperkuat upaya cegah tangkal serta melakukan analisis mendalam terhadap tren pelanggaran.

7. Grand Design Laboratorium. BPOM meluncurkan grand design penguatan laboratorium sebagai fondasi sistem pengawasan yang adaptif dan modern. Langkah ini mencakup pengembangan jejaring laboratorium OBA dan kosmetik, pembentukan laboratorium regional di Jayapura, serta penguatan metode analisis dan layanan digital seperti INFALABS. Laboratorium BPOM juga kini mendukung pengawasan terhadap produk ATMPs dan berperan aktif dalam pengakuan laboratorium eksternal.

8. Kerja Sama Lintas Sektor. Untuk membangun sistem pengawasan yang kuat dan kolaboratif, BPOM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Sinergi dilakukan dengan BRIN dan Kemenkes untuk penguatan uji klinik nasional, dengan IPB dalam bidang penelitian dan edukasi, serta dengan BSSN dan BIN dalam hal keamanan siber. Di sisi masyarakat, BPOM melanjutkan program Germas Sapa yang menyatukan berbagai inisiatif pangan aman berbasis komunitas.

9. Dukungan Manajemen. BPOM terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengembangan SDM melalui berbagai strategi:
- **Tunjangan dan Organisasi:** Penyesuaian tunjangan kinerja serta penataan organisasi UPT sebagai langkah efisiensi struktural dan peningkatan layanan.
- **Manajemen SDM & Kepemimpinan:** Penerapan pendekatan neuro-leadership untuk mendukung kepemimpinan yang adaptif dan berkelanjutan.
- **Pengembangan Kompetensi:** Melalui pelatihan, sertifikasi, IELTS Prediction Test, PKPA, serta pelatihan teknis dan fungsional.
- **Budaya Kerja & Dialog:** Dialog BerAKHLAK dan Leader Dialogue mendukung budaya kerja yang sehat dan berintegritas.
- **Kolaborasi Pendidikan:** Kunjungan sekolah/universitas ke BPOM dan penerbitan Jurnal Eruditio memperkuat peran edukatif BPOM.
- **Sistem & Teknologi:** Implementasi interoperabilitas data, BPOM Command Center (BCC), SPBE, serta penggunaan infrastruktur Pusat Data Nasional.
- **Standarisasi ISO:** Penerapan dan pemeliharaan standar ISO untuk mendukung kualitas layanan dan keamanan informasi.
- **Pengadaan & Laboratorium:** Penguatan sistem pengadaan berbasis digital dan konsolidasi reagen pengujian laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan.

Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing

BPOM memberikan dukungan nyata bagi penguatan UMKM obat dan makanan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi.

Pertama, melalui platform IDEAS (Integrated Development and Training Information System), pelaku usaha dapat mengakses pelatihan dan program pengembangan kompetensi secara digital untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kepatuhan terhadap regulasi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kedua, BPOM meluncurkan program TEMAN UMKM Kosmetik sebagai respons atas tingginya pelanggaran penandaan kosmetik. Pendekatan dilakukan secara on-site melalui inspeksi sarana dan melalui event bimbingan teknis. Program ini telah menjangkau 311 pelaku UMKM kosmetik secara hybrid, baik oleh BPOM pusat maupun UPT.

Ketiga, dalam upaya mempercepat perolehan izin edar pangan olahan bagi UMKM, BPOM menyelenggarakan program pendampingan registrasi pangan olahan yang bersifat jemput bola, mencakup sosialisasi, bimtek, coaching, dan desk registrasi. Hasilnya, hingga 2024 telah terbit 3.406 Izin Edar UMKM dari 2.318 pelaku usaha yang didampingi.

Selanjutnya, melalui program SAPA (Sadar Pangan Aman) UMK, BPOM membina UMK pangan olahan dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Program ini dilakukan bersama mitra kampus (SAPA Kampus) dan industri besar (Orang Tua Angkat), serta dilengkapi dengan berbagai skema pendampingan seperti bimtek CPPOB dan e-registrasi. Hingga akhir 2024, telah diterbitkan 884 IP CPPOB untuk pelaku UMK.

Terakhir, Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan melibatkan 27 industri besar untuk membina pelaku usaha kecil melalui model inclusive closed loop dan one way system. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan teknis dan kualitas antara pelaku usaha besar dan kecil, serta mempercepat UMK memenuhi standar mutu dan legalitas produk.

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan skor tertinggi pada tahun 2024 sebesar 96,24, mencerminkan konsistensi dalam penyederhanaan birokrasi, pelayanan publik yang cepat, dan zona integritas di seluruh unit kerja.

Seluruh ASN BPOM juga menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap pelaporan harta kekayaan, dengan capaian 100% pelaporan LHKPN tahun 2024.

Untuk memperkuat budaya integritas, BPOM menggelar Café Integritas Seri 4 dengan tema "Judi Online di Kalangan ASN", bertujuan meningkatkan kesadaran risiko hukum dan sosial serta mendorong ASN menjaga nilai integritas.

Dalam aspek pengawasan internal, BPOM mengembangkan sistem SIMAKIN dan SAPA APIP untuk menyatukan manajemen kinerja dan risiko. Integrasi ini memungkinkan pemetaan risiko unit kerja secara langsung dalam sistem kinerja. Di samping itu, BPOM menerapkan Continuous Auditing and Monitoring (CACM) melalui dashboard baru di Command Center (BCC) untuk memastikan pengawasan real-time, transparan, dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), BPOM aktif dalam dua fokus utama: Penguatan tata kelola impor dan Digitalisasi. Melalui integrasi sistem SSm Perizinan, e-Pharm, dan Exim, BPOM bersama KPK dan Kementerian/Lembaga lain memperkuat sistem pengawasan perizinan ekspor-impor khususnya untuk komoditas narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan ke Depan

Dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, BPOM terus mendorong transformasi digital dan inovasi layanan publik.

Salah satu inovasi utama adalah pengembangan aplikasi BPOM Mobile dengan tagline “Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman”. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memverifikasi legalitas dan keamanan produk secara mandiri melalui pemindaian 2D Barcode atau pencarian nomor registrasi.

BPOM Mobile juga menyediakan fitur pelaporan untuk masyarakat yang menemukan produk mencurigakan. Aplikasi ini telah diimplementasikan sejak 2018 dan terus diperkuat sebagai bagian dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kehadiran BPOM Mobile menjadi simbol keterbukaan informasi, peningkatan partisipasi publik, serta transparansi dalam pengawasan obat dan makanan nasional.

DARI AKAR NUSANTARA MENUJU PANGGUNG DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

DAFTAR ISI

BAB I. Implementasi Direktif Presiden 1

BPOM Menuju Standar Global 2
Komitmen BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA) 2
Mempertahankan Keanggotaan Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) 3

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi 2
Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik 2
BPOM selesaikan 915 Registrasi Ulang Obat Generik 5
BPOM Bergerak FAST 5
Hilirisasi dan Penguatan Fitofarmaka Melalui Business Matching Peneliti, Industri dan Lembaga Riset 7
Program Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam 7

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman 9
FOKKUS KEK SANUR 9
Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba 9
“Tebar” PESONA untuk Produk Aman dan Berkualitas 12
SEMARAK Kosmetik: Selebrasi Inovasi untuk Produk Aman dan Berkualitas 12
Public Warning Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya 13
Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024: Mengawal Kemajuan Industri Kosmetik Nasional 13
Pengawalan Ekspor Pangan: Memastikan Keamanan dan Mendorong Daya Saing 14
Program Manajemen Risiko 15

Percepatan Perizinan Obat Inovasi 16
Penerbitan Izin Edar Fezolinetant Tablet 16
BPOM Bentuk Komnas Penilai Obat 2025–2029 untuk Perkuat Regulasi dan Mutu Obat 16

BAB II. Memperkuat Peran Strategis BPOM 17

Percepatan Pelayanan Publik 18
Peningkatan Layanan terhadap Obat Tradisional 18
Pelayanan Proaksi Berpadu 18
Pendampingan Penelitian Uji Praklinik/Klinik 19
Percepatan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas 19
Asistensi Regulatori Pelayanan Publik Sertifikasi CDOB 20

Penguatan Penindakan ---- **21**
Patroli Siber Perangi Produk Ilegal ---- 21
Pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital ---- 21
Kolaborasi Pengawasan Produk Ilegal ---- 25
Cegah Tangkal Ungkap Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan ---- 26
Analisis Fenomena Kejahatan Antisipasi Pelanggaran ---- 26

Grand Design Laboratorium ---- **27**
Launching Grand Design Penguatan Laboratorium ---- 27
Dukungan BPOM terhadap ATMPs ---- 27
Pengembangan Jejaring Laboratorium ---- 28
Regionalisasi Laboratorium ---- 28
Pengembangan Metode Analisis Pengujian ---- 29
Layanan Penyediaan Baku Pembanding untuk Pengujian ---- 29
Pilot Project Rekognisi Laboratorium ---- 30

Kerja Sama Lintas Sektor ---- **31**
Sinergi untuk Ekosistem Uji Klinik Berkualitas dengan BRIN dan Kemenkes ---- 31
Penandatanganan MoU dengan IPB ---- 31
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN dan BIN ---- 37
GERMAS SAPA Budayakan Hidup Sehat ---- 37

Dukungan Manajemen ---- **40**
Perkembangan Penyesuaian Tunjangan Kinerja BPOM ---- 40
Penataan Organisasi UPT BPOM ---- 40
Strategi Kepemimpinan dan Manajemen SDM dalam Kerangka Implementasi Ekonomi Sirkular ---- 41
Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi Global BPOM ---- 41
BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ---- 42
Pengembangan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah ---- 42
Dialog Kepala BPOM dan Leader Dialogue ---- 43
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM POM melalui Sertifikasi ---- 43
Kunjungan Sekolah atau Universitas ke Lingkungan BPOM Pusat ---- 44
Penilaian Kompetensi Melalui Perbandingan Antara Capaian Kompetensi Pegawai dan Persyaratan Dengan Standar Kompetensi ---- 44
Pengembangan Kompetensi Dalam Negeri (Pelatihan Fungsional dan Teknis) ---- 45
IELTS Prediction Test untuk Peningkatan SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Berdaya Siang Global ---- 45
Penerbitan Jurnal Eruditio ---- 46
Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ---- 46
Interoperabilitas Data Pengawasan Obat dan Makanan ---- 47
Implementasi BPOM Command Center (BCC) ---- 47
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM ---- 48
Penerapan ISO ---- 48
Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data ---- 49
Indeks Tata Kelola Pengadaan BPOM ---- 49
Pengadaan Reagensia Pengujian ---- 50

BAB III. Dukungan BPOM Mewujudkan UMKM Berdaya Saing 51

Dukungan BPOM Terhadap UMKM Bagi Pelaku Usaha Obat dan Makanan 52
Teman UMKM Kosmetik 52
Pendampingan Registrasi Pangan Olahan 53
Pemberdayaan UMK - SAPA 54
Pemberdayaan UMKM - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan 54

BAB IV. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas 55

Indeks RB BPOM Tahun 2024 56
Pelaporan LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara) 57
Cafe Integritas Series 4 57
Digitalisasi Pengawasan Intern 58
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 58

BAB V. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan Kedepan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 59

BPOM Mobile 60

DARI AKAR NUSANTARA MENUJU PANGGUNG DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

BAB I.

IMPLEMENTASI
DIREKTIF PRESIDEN

Implementasi Direktif Presiden

BPOM Menuju Standar Global

Komitmen BPOM menuju WHO Listed Authority (WLA)

Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan nasional, BPOM Republik Indonesia terus memperkuat kapasitas kelembagaan agar setara dengan otoritas regulatori global. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya menjadi bagian dari **WHO Listed Authority (WLA),** yaitu pengakuan WHO bagi lembaga dengan kinerja regulatori berstandar tinggi, transparan, dan berbasis bukti ilmiah.

Keanggotaan WLA menempatkan Indonesia sebagai **trusted regulatory authority** yang diakui secara internasional. Status ini memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing sektor farmasi nasional, serta mempermudah akses ekspor produk obat, vaksin, dan produk kesehatan melalui mekanisme *regulatory reliance*.

Hingga Agustus 2025, sebanyak **37 negara,** yang mayoritas merupakan negara maju, telah masuk dalam daftar WLA.

Di tengah dominasi tersebut, proses pengajuan BPOM menjadi momentum penting bagi negara berkembang, ditandai dengan *kick-off meeting* pada 6 Agustus 2025 dan *onsite performance evaluation* WHO pada 7–13 Agustus 2025 di sejumlah wilayah di Indonesia.

Komitmen dan kerja panjang BPOM membuahkan hasil ketika pada **21 Desember 2025**, WHO secara resmi menetapkan Indonesia bersama Australia sebagai **WHO Listed Authority**. BPOM RI dinyatakan telah memenuhi standar internasional tertinggi WHO, sehingga jaringan WLA global kini mencakup **41 otoritas dari 39 negara**.

Pencapaian ini menjadikan BPOM sebagai **otoritas regulatori pertama dari negara berpendapatan menengah** yang meraih status WLA sebagai standalone agency. Status tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai regulator rujukan kawasan, mendukung percepatan akses obat dan vaksin esensial, serta menegaskan pengakuan global terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia.

Implementasi Direktif Presiden

BPOM Menuju Standar Global

Mempertahankan Keanggotaan Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)

Pengawasan berstandar global terus diperkuat untuk mewujudkan produk yang aman, berdaya saing, dan diakui secara internasional. Salah satunya melalui Reassessment keanggotaan Indonesia dala, forum Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) pada 2-6 Desember 2024. Sebagai organisasi internasional di bidang farmasi, PIC/S memfasilitasi kerjasama antara otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam.

Upaya Lolos Reassessment PIC/S

- Integrasi Sistem Mutu Inspektorat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
- Mock-Inspection kepada Industri Obat Tradisional (IOT)
- Rapat Persiapan dan Pembaruan Perkembangan secara Berkala
- Forum Komunikasi CPOTB dan Pertemuan Koordinasi Inspektur

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik

BPOM Percepat Registrasi Ulang Obat Generik melalui kegiatan *Kick Off* Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik. Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk mendukung percepatan registrasi obat dalam program JKN. BPOM terus memberikan pendampingan dan asistensi regulatori kepada industri farmasi agar dapat memenuhi regulasi yang terus berkembang, sekaligus mempercepat proses registrasi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) dan diikuti oleh 77 industri farmasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka kegiatan Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) Re-Assessment yang diselenggarakan di Kantor BPOM pada Senin (3/12/2024). Re-assessment atau penilaian kembali ini dilakukan sebagai bagian dari proses perpanjangan keanggotaan BPOM di dalam PIC/S yang telah dimulai sejak tahun 2012.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar melakukan visitasi ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Santosa Hospital Bandung Central (SHBC) pada Rabu (16/4/2025). Visitasi ini dilakukan Kepala BPOM beserta jajaran dalam rangka memastikan pengelolaan dan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai standar.

Implementasi Direktif Presiden

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

BPOM selesaikan 915 Registrasi Ulang Obat Generik

Sepanjang tahun 2024, BPOM secara proaktif menjalin kolaborasi sinergis dengan industri farmasi nasional di empat wilayah GPFI: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Hasilnya, BPOM berhasil menyelesaikan 915 nomor izin edar (NIE) obat yang masa berlakunya telah habis, sesuai laporan GPFI pada Oktober 2024. Pencapaian ini mencerminkan komitmen BPOM dalam mempercepat registrasi ulang obat, sekaligus menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar di Indonesia.

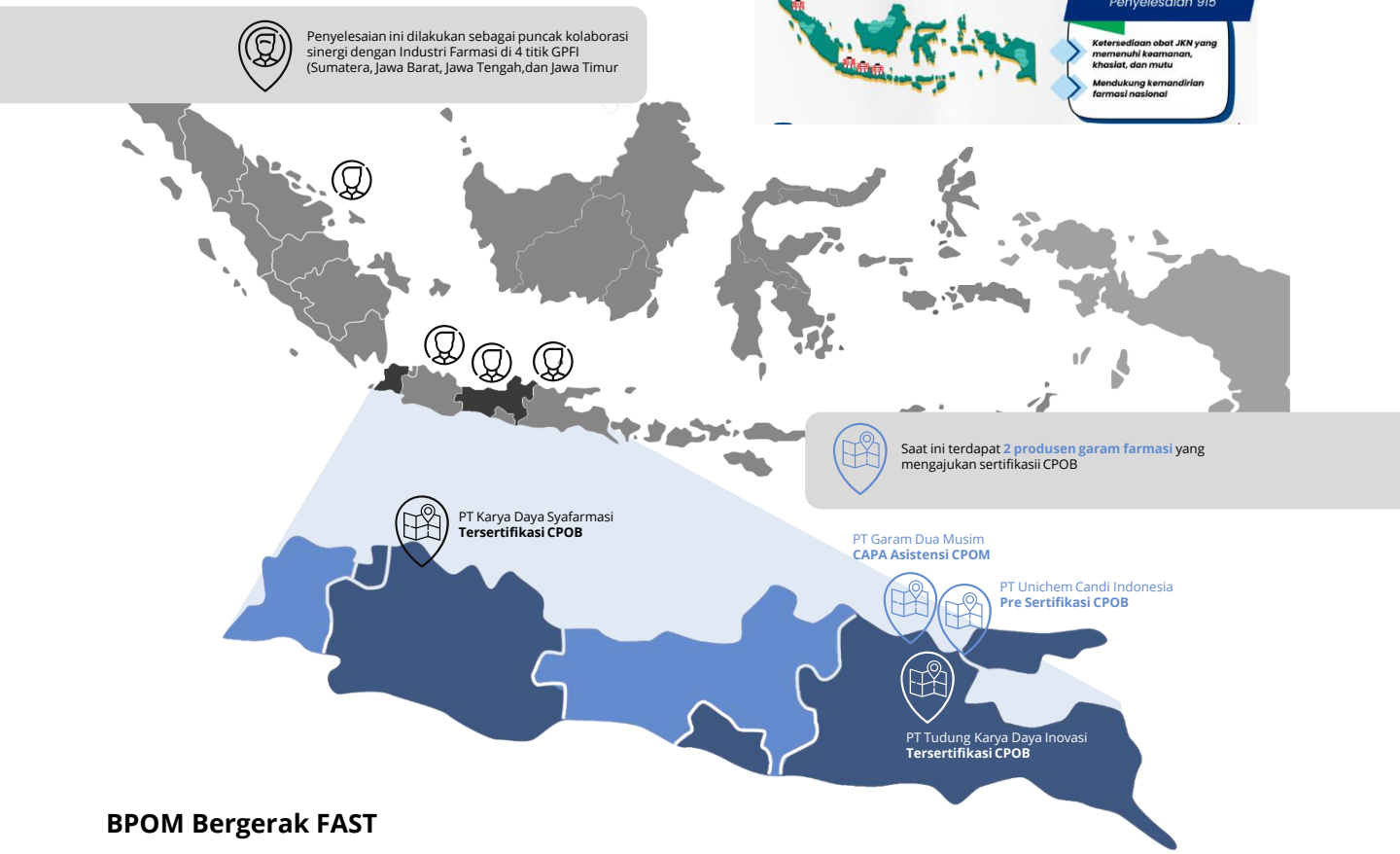

BPOM Bergerak FAST

BPOM Bergerak FAST (Beraksi Percepat Registrasi Perubahan Garam Lokal, Fix Aman Standar Terjaga) adalah inisiatif BPOM untuk mendorong penggunaan bahan baku obat lokal, khususnya garam farmasi dalam negeri. Program ini mempercepat proses registrasi perubahan sumber bahan baku agar obat yang dihasilkan tetap aman, berkhasiat, dan bermutu. BPOM juga memberikan pendampingan regulatori kepada industri farmasi agar proses berjalan lebih cepat dan sesuai standar. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian Indonesia dalam penyediaan obat yang berkualitas dan terjangkau.

BPOM melaksanakan kegiatan Kolaborasi Sinergis BPOM-Industri Farmasi Obat dengan Garam Farmasi Nasional pada Senin (3/2/2025) di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih Kantor BPOM. Kepala BPOM Optimistis Wujudkan Kemandirian Garam Farmasi Sebagai Bahan Baku Obat Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Sediaan Farmasi

Implementasi Direktif Presiden

Upaya Penurunan Harga Biaya Farmasi

Hilirisasi dan Penguatan Fitofarmaka Melalui *Business Matching* Peneliti, Industri dan Lembaga Riset

BPOM menginisiasi kegiatan strategis bertajuk *Business Matching* Peneliti, Industri, dan Lembaga Riset FItofarmaka bersama RS Universitas Airlangga. Tujuannya membangun kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lembaga penelitian. Kerja sama ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan inovasi dengan proses komersialisasi produk.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan fitofarmaka yang telah teruji keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji klinik sehingga dapat disejajarkan dengan obat modern. Pengembangan fitofarmaka melalui model kolaboratif ini diharapkan dapat menurunkan harga sediaan farmasi. Dengan bahan baku lokal yang terstandarisasi dan proses produksi yang efisien, biaya produksi dapat ditekan sehingga produk akhir menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Kutipan:

> **“Fitofarmaka bisa menjadi solusi lokal yang tidak hanya menjawab kebutuhan nasional, tapi juga memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.**
>
> -Kepala BPOM, Taruna Ikrar-

Kepala BPOM mengunjungi fasilitas uji klinik di RS Universitas Airlangga untuk melihat melihat proses uji klinik sebagai tahapan penting dalam pengembangan produk berbahan alam, Surabaya (19/9/2024).

Program Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam

Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor serta menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas bagi industri. Hal ini sekaligus mendukung Asta Cita ke-5 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Seiring dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

Salah satu aspek yang mendukung pengembangan fitofarmaka tersebut adalah aspek Standardisasi bahan baku OBA. Kendala dan tantangan dalam hal tersebut adalah belum tersedianya bahan baku OBA yang sustainable dan terjaga ketersediaannya.

Langkah Strategis

1. **Peluncuran AIRINDO (Asosiasi Industri Ekstrak Bahan Alam dan Rempah Indonesia)**, ada 8 anggota Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)
2. **Kolaborasi lintas sektor** (Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BRIN, AIRINDO, GP Jamu, dan pelaku industri)
3. **Focus Group Discussion Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam** (Ada 50 Simplisia Bahan Baku OBA yang menjadi prioritas dan banyak digunakan)
4. **Pelatihan Peningkatan Pemahaman Supplier Bahan Baku Obat Bahan Alam** (Suplier diberi pelatihan cara penanganan bahan baku simplisia setelah pasca panen
5. **Penentuan Duta inspiratif** dalam membangun kemandirian bahan baku OBA
6. **Penghargaan** kepada Asosiasi yang berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian bahan baku OBA

BPOM melaksanakan kegiatan Kolaborasi Sinergis BPOM-Industri Farmasi Obat dengan Garam Farmasi Nasional pada Senin (3/2/2025) di Auditorium lantai 8 Gedung Merah Putih Kantor BPOM. Kepala BPOM Optimistis Wujudkan Kemandirian Garam Farmasi Sebagai Bahan Baku Obat Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Sediaan Farmasi

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Kepala BPOM Taruna Ikrar memberikan sambutan pada acara Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba di Kantor BPOM, Jakarta (29/11/2024).

FOKKUS KEK SANUR

FOKKUS KEK Sanur (Forum Koordinasi Khusus SAS di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur) adalah inisiatif untuk memperkuat pengawasan obat demi melindungi masyarakat. Kegiatan ini fokus pada pengawalan pemasukan *Special Access Scheme* (SAS) obat serta mempererat koordinasi antara BPOM dan para pemangku kepentingan di KEK Sanur. Selain itu, FOKKUS KEK Sanur juga bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang alur pemasukan obat jalur khusus dan aturan uji klinik di Indonesia.

Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pengendalian resistensi antimikroba (AMR) merupakan salah satu program prioritas Kepala BPOM. Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi kesehatan global yang semakin mengkhawatirkan. Penggunaan antimikroba yang tidak bijak dan substandar telah mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Akibatnya, infeksi umum yang sebelumnya mudah diobati kini menjadi lebih sulit, mahal, bahkan mematikan.

Kondisi ini mengancam keberhasilan pengobatan modern, termasuk operasi besar dan terapi kanker, yang sangat bergantung pada efektivitas antimikroba. Tindakan kolektif dan kesadaran lintas sektor sangat diperlukan untuk mencegah krisis kesehatan yang lebih besar di masa depan. Termasuk efektivitas pengawasan BPOM terhadap mutu obat yang beredar.

> **Ingat! Antibiotik bukan obat segala penyakit. Ini adalah silent pandemic jika terus dibiarkan, 10 juta kematian akibat AMR diprediksi akan terjadi pada 2050.**
>
> -Kepala BPOM, Taruna Ikrar-

Jenis Antimikroba

Pengawasan BPOM

Data Hasil Pengawasan

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Rancangan Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025 – 2029

5 Sasaran Strategis

- PENGUATAN KEBIJAKAN
- PENINGKATAN KAPASITAS
- SURVEILANS
- INTERVENSI
- ADVOKASI DAN KERJASAMA

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan RPJMN 2025 – 2029

Capaian Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba

BPOM memiliki kebijakan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.03.20.98 tahun 2020 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Antimicrobial Resistence di Lingkungan BPOM tahun 2020-2024

Upaya Pengendalian Resistensi Antimikroba di UPT BPOM

- Pemeriksaan Bersama (***Joint Inspection***)
- **Bimtek dan Advokasi**
- **Edukasi** Kepada Masyarakat Luas

Persentase Apotek yang Menjual Antibiotik Tanpa Resep Dokter 2024

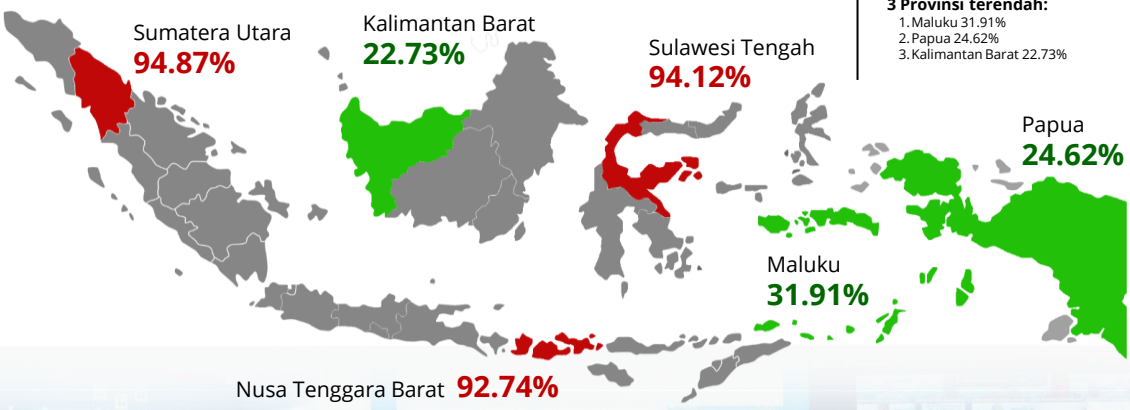

3 Provinsi tertinggi:
1. Sumatera Utara 94.87%
2. Sulawesi Tengah 94.12%
3. Nusa Tenggara Barat 92.74%

3 Provinsi terendah:
1. Maluku 31.91%
2. Papua 24.62%
3. Kalimantan Barat 22.73%

"Antibiotik bukan obat segala penyakit," tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba (29/11/2024). Puncak acara mencatat rekor MURI atas ikrar bersama terbanyak secara hybrid.

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

"Tebar" PESONA untuk Produk Aman dan Berkualitas

Program Manajemen Risiko Obat Bahan Alam adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam. Pelaku usaha diajak terlibat dan bertanggung jawab penuh atas produk obat bahan alam yang diproduksi. Pemberian kepercayaan ini memerlukan komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan regulasi yang tinggi.

SEMARAK Kosmetik: Selebrasi Inovasi untuk Produk Aman dan Berkualitas

SEMARAK Kosmetik menjadi wadah strategis untuk menampilkan inovasi, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan serta mutu produk kosmetik. Kegiatan ini dilaksanakan di Surabaya dengan tema "Moving Forward Together" dengan menghadirkan sekitar 400 peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku industri, komunitas *beauty enthusiast*, dan lembaga pemerintah terkait.

Program Inovatif SEMARAK

Kampanye dan dialog interaktif BERSERU
(Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru)
Talkshow dan Expo Cosmetic Toll Manufacturer
Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
One Stop Public Services

11 **industri sebagai percontohan berdasarkan hasil penilaian mautritas level 4 & 5**

Aspek penilaian maturitas

Aspek Pemenuhan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik)
- Klaster Industri berdasarkan hasil pemetaan CPOTB
- Rekam jejak pemeriksaan CPOTB
- Analisis kesenjangan (gap analysis) CPOTB 2021

Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSK)
- Rekam jejak pelanggaran keamanan
- Rekam jejak pelanggaran mutu
- Rekam jejak pelanggaran penandaan

> **Pelaku usaha yang ingin memiliki brand kosmetik sendiri dapat memiliki izin edar kosmetik dengan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)**
>
> -Kepala BPOM, Taruna Ikrar-

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Public Warning Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya

Dalam periode Agustus 2024 - Agustus 2025, BPOM telah melakukan pengawasan intensif terhadap produk kosmetik yang beredar di pasar, termasuk pada platform online. Dari hasil sampling dan uji laboratorium, ditemukan beberapa produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang/berbahaya. BPOM telah melakukan pengumuman publik terhadap temuan produk kosmetik tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada Desember 2024, April 2025, dan Agustus 2025. Pengumuman publik pada Desember 2024 terdiri dari 35 item kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, 14 item kosmetik impor, dan 6 item kosmetik yang diproduksi serta diedarkan oleh industri lokal. Pada awal tahun 2025, yaitu pengumuman publik di bulan April, temuan terdiri dari 10 item kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi dan 6 item kosmetik impor. Pada bulan Agustus 2025, temuan terdiri dari 28 item kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, 4 item kosmetik impor, dan 2 item kosmetik yang diproduksi serta diedarkan oleh industri lokal.

Kepala BPOM dan Menteri Perdagangan menunjukkan barang bukti kosmetik ilegal senilai Rp11,4 miliar dalam konferensi pers bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor (Kosmetik Impor Ilegal) di Kantor BPOM, Jakarta, (30/9/2024).

Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024: Mengawal Kemajuan Industri Kosmetik Nasional

Cosmetic Toll Manufacturer Expo 2024 merupakan bagian dari program Iklim Positif Kontrak Produksi Kosmetik yang dirancang untuk mendorong pengembangan industri kosmetik nasional melalui edukasi, supervisi, dan fasilitasi. Program ini memiliki misi strategis untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN) Kosmetik, pelaku usaha penerima kontrak produksi, dan masyarakat umum.

"BPOM telah memberikan sebuah fasilitas kepada UMKM untuk membuka, memproduksi kosmetik tidak harus dengan pabriknya sendiri. Bisa dengan kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang telah ada, tapi memakai merek sendiri".
-Kepala BPOM Taruna Ikrar-

Jumlah BUPN kosmetik mencapai 1.904 pelaku usaha atau sekitar lebih dari 50% dari total pemilik izin edar kosmetik.

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Pengawalan Ekspor Pangan: Memastikan Keamanan dan Mendorong Daya Saing

BPOM terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk pangan olahan Indonesia di pasar global. Salah satunya melalui pendampingan bagi produsen yang ingin mengekspor produknya. Pendampingan ini sangat penting mengingat masih adanya produk pangan olahan asal Indonesia yang terkendala masuk ke beberapa negara.

Untuk itu, BPOM menggelar ***Focus Goup Discussion*** **(FGD) "Pengawalan Ekspor Pangan: Keamanan dan Daya Saing"** pada 4 Oktober 2024. Forum ini melibatkan lintas sektor terkait mulai dari **perwakilan k/l (**Kemenko Perekonomian, Kemendag, KKP, Kementan, Kemendagri, Kemenkeu, Barantin, Bapanas, BSN, KJRI), **Pakar Keamanan Pangan** Prof. Dedi Fardiaz, dan **Asosiasi Pelaku Usaha** (GAPMMI, APMMOI)

Tujuan Pendampingan Ekspor Pangan Olah*an*

Menyusun **langkah mitigasi risiko** dan pencegahan penolakan ekspor
Memperkuat **sinergi dan komitmen** lintas K/L serta pelaku usaha, agar dapat mengantisipasi terjadinya penolakan ekspor produk pangan.
Menyusun **rencana aksi** bersama kementerian/lembaga

Adanya **118 kasus** penolakan ekspor produk pangan olahan asal Indonesia di berbagai negara pada tahun 2021-2024.

Output Yang Dihasilkan

Matriks **Rencana Aksi Bersama** terkait Langkah mitigasi risiko dan pencegahan penolakan ekspor
Pembentukan **Forum Fasilitasi Ekspor Pangan** (pertemuan setiap 6 bulan untuk membahas isu terkait penolakan ekspor pangan asal Indonesia).

Berbagai upaya yang dilakukan BPOM telah menghasilkan capaian jumlah Izin Penerapan Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk keperluan ekspor. Penerbitan IP CPPOB ekspor sangat penting untuk memastikan pangan yang diproduksi aman. Hal ini juga sekaligus sebagai langkah meningkatkan level pemenuhan regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan.

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Program Manajemen Risiko

BPOM mendukung industri pangan untuk meningkatkan label pemenuhan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan melalui izin penerapan program manajemen risiko untuk pangan olahan non risiko tinggi.
Pada 4 Maret 2025, sosialisasi dilakukan kepada industri pangan olahan sebagai wadah penguatan komitmen dalam kemandirian industri skala besar. Tujuannya industri dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan sistem keamanan pangan sehingga meningkatkan daya saing, kemandirian, dan kepercayaan publik.

"PMR ditujukan untuk kemandirian industri pangan dalam mengendalikan risiko terjadinya penyakit bawaan pangan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan oleh pelaku usaha serta dimonitor oleh BPOM, sistem OMR setara dengan private standard yang diakui secara internasional".

Lima Kunci Budaya Keamanan Pangan

1. *Leadership Commitment*
2. *Employee Training & Competency*
3. *Clear Policies & Procedures*
4. *Open Communication & Reporting*
5. *Cotinuous Monitoring & Feedback*

Keuntungan IP PMR Pangan Olahan Non Risiko Tinggi

1. *Percepatan Registrasi: Waktu penilaian singkat dari 30HK jadi 15HK*
2. *Layanan Prioritas: Penerbitan izin CPPOB lebih cepat*
3. *Ekspor Mudah: Surat Keterangan Ekspor Prioritas dengan track record baik (tidak ada penolakan ekspor 2 tahun terakhir, frekuensi ekspor minimal 3 kali dalam 12 bulan ke negara yang sama)*

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Implementasi Direktif Presiden

Penjaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Aman

Penguatan Regulasi Pangan Olahan

Regulasi pangan olahan menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam pengembangan pangan olahan unggulan yang berdaya saing, karena regulasi menjadi acuan mutu dan keamanan yang dapat dideskripsikan untuk pemenuhan keingan konsumen sekaligus memberikan jaminan keamanan. Produk pangan olahan unggulan yang berdaya saing tinggi diperlukan dalam menghadapi persaingan global. Selama kurun tahun 2024 sampai saat ini, BPOM sudah menerbitkan regulasi/standar pangan olahan sebagai berikut::

- **Keputusan Kepala BPOM Nomor 70 Tahun 2025** tentang Perubahan Kategori Pangan dan Perubahan Bahan Baku yang Berasal dari Tanaman atau Hewan
- **Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2025** tentang Jenis Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis yang Menggunakan Teknologi Halang Rintang (Hurdle Technology) dan Kriteria Kondisi yang dapat Menghambat Pertumbuhan dan/atau Inaktivasi Spora Clostridium Botulinum
- **Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2025** tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah dikemas Hermetis
- **Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
- **Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024** tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi
- **Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2024** tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik
- **Pedoman Keamanan Pangan dalam Penjualan Pangan Olahan Isi Ulang menggunakan Dispenser**
- **Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).**

Pada tahun 2025 ini juga, BPOM masih berproses melakukan penyusunan regulasi berikut:

1. Revisi Peraturan BPOM tentang **Informasi NIlai Gizi pada Label Pangan Olahan**
2. Revisi Peraturan BPOM tentang **Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus**
3. Revisi Keputusan Kepala BPOM tentang **Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro**
4. Revisi Peraturan BPOM tentang **Bahan Tambahan Pangan**
5. Revisi Peraturan BPOM tentang **Cemaran Pangan**
6. Revisi Peraturan BPOM tentang **Kemasan Pangan**
7. **Pedoman Persyaratan Keamanan dan Mutu Air Baku dan Air Minum yang berasal dari Air Hujan**

Implementasi Direktif Presiden

Percepatan Perizinan Obat Inovasi

Penerbitan Izin Edar Fezolinetant Tablet

BPOM berhasil menerbitkan izin edar Fezolinetant tablet salut selaput 45 mg hanya dalam 54 hari kerja. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala vasomotor (VMS) sedang hingga berat yang dialami perempuan saat menopause.

Penerbitan cepat ini menjadi bukti nyata keberhasilan penerapan mekanisme reliance di Indonesia—sebuah pendekatan yang mengacu pada hasil evaluasi dari otoritas regulatori negara lain yang sistemnya sudah mapan. Melalui mekanisme ini, waktu evaluasi registrasi obat dipersingkat dari 120 hari menjadi hanya 90 hari kerja, tanpa mengorbankan aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Langkah ini mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang berkualitas dan sesuai standar internasional.

BPOM Bentuk Komnas Penilai Obat 2025–2029 untuk Perkuat Regulasi dan Mutu Obat

Dalam upaya meningkatkan kualitas obat di Indonesia dan memperkuat peran regulatori dalam penilaian khasiat serta keamanan obat, BPOM membentuk Komite Nasional (Komnas) Penilai Obat periode 2025–2029. Pembentukan tim ini merupakan hasil kolaborasi antara BPOM dan para ahli dari berbagai bidang, seperti kedokteran, farmasi, regulasi, dan ilmu terkait lainnya. Para ahli tersebut berasal dari sembilan universitas terkemuka di Indonesia: Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Andalas, dan Universitas Trisakti.

Keberadaan Komnas Penilai Obat 2025–2029 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 86 Tahun 2025. Komnas Penilai Obat berperan sebagai *peer reviewer* independen, yang memberikan rekomendasi ilmiah terhadap hasil evaluasi khasiat dan keamanan obat secara komprehensif, objektif, dan berbasis bukti. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya BPOM memastikan setiap obat yang beredar di Indonesia aman, efektif, dan bermutu tinggi.

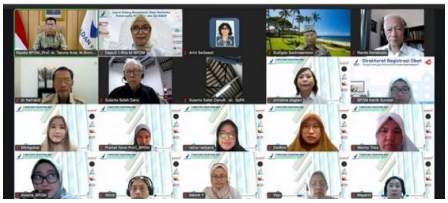

BAB II.

MEMPERKUAT
PERAN STRATEGIS BPOM

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Percepatan Pelayanan Publik

Peningkatan Layanan terhadap Obat Tradisional

Pelayanan publik yang prima menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk obat tradisional atau obat bahan alam (OBA). Terlebih terdapat potensi besar OBA sebagai produk andalan ekspor karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan kekuatan industri, serta komitmen dari seluruh pihak.

BPOM meluncurkan program Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan secara Digital Menuju Indonesia Emas). Kegiatan ini sebagai upaya mendukung Asta Cita Pemerintah melalui dukungan dalam pengembangan UMKM, khususnya untuk produk OBA dan suplemen kesehatan agar tetap berdaya saing di era transformasi digital.

Pelayanan Proaksi Berpadu

Program Akselerasi Bersama Registrasi dan Pendampingan Terpadu (ProAksi Berpadu) menjadi terobosan strategis untuk menjangkau langsung pelaku usaha dan peneliti melalui tiga fokus utama: percepatan registrasi dan notifikasi, peningkatan pemahaman stakeholder, serta digitalisasi media informasi. Pendekatan jangkau langsung ke daerah sentra produksi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik diharapkan mampu mempercepat penerbitan izin edar, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha dan memberi dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan Proaksi Berpadu per Agustus 2025

Pendampingan
6.773
Pelaku Usaha dan Peneliti

Dari pendampingan tersebut telah terbit
32.638 Nomor Izin Edar

Kegiatan Peningkatan Layanan

Bimtek Naik Kelas UMKM OBA - Pengendalian Mutu Produk yang diproduksi indstri OBA dan Non-OBA bagi UKOT

Bimtek Dukungan Ekosistem Ekspor OBA - Peningkatan Kemampuan Ekspor Pelaku Usaha

Percepatan Sertifikasi OBA dan Suplemen Kesehatan

Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan Secara Digital Menuju Indonesia Emas)

Kepala BPOM meluncurkan program Gemilang Indonesia Emas (Gerakan Peningkatan Literasi Kesehatan secara Digital Menuju Indonesia Emas), Selasa (10/12/2024). Gemilang Indonesia Emas merupakan program hasil kolaborasi BPOM dengan Siberkreasi, berupa gerakan jejaring multi-stakeholder yang bertujuan meningkatkan literasi digital melalui konten positif dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Percepatan Pelayanan Publik

Pendampingan Penelitian Uji Praklinik/Klinik

BPOM memandang penelitian melalui uji praklinik dan/atau uji klinik sebagai tahapan krusial dalam pengembangan obat bahan alam (OBA). Untuk itu, BPOM secara berkelanjutan memberikan pendampingan kepada peneliti dan pelaku usaha, mulai dari penyusunan protokol uji praklinik/klinik hingga pelaksanaan uji klinik, guna mendorong percepatan hilirisasi produk menjadi obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka (FF) yang aman, bermutu, berkhasiat, dan berdaya saing.

Dukungan Uji Praklinik/Klinik OBA:

- Simplifikasi Regulasi - Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pelaksanaan Uji Pra Klinik/Klinik
- Pendampingan Penyusunan Protokol & Pelaksanaan Uji Praklinik/Klinik
- Evaluasi Protokol dan/atau Hasil Uji Praklinik/Klinik
- Pengembangan Aplikasi Pengajuan Uji Praklinik/Klinik
- Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha dan Peneliti

Sejumlah 187 protokol maupun hasil uji praklinik dan uji klinik OBA per Agustus 2025 yang telah dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. **35 hasil uji praklinik**
2. **29 hasil uji klinik**
3. **95 protokol uji praklinik**
4. **28 protokol uji klinik**

Percepatan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas

BPOM juga telah meluncurkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan Olahan Prioritas pada 22 Oktober 2024. Hal ini bertujuan sebagai bentuk *reward* untuk pelaku usaha berkinerja baik dan dukungan BPOM pada percepatan layanan dan peningkatan ekspor.

Ketentuan Penerima Layanan

1. Pelaku usaha dengan **rekam jejak baik**
2. Tidak pernah mengalami **penolakan** dari negara tujuan ekspor dalam waktu 2 tahun terakhir
3. **Frekuensi ekspor** minimal 3 kali ke negara yang sama dalam waktu 12 bulan terakhir

Pemangkasan ***timeline***:
Waktu penerbitan SKE lebih singkat

Pemangkasan **proses evaluasi**:
Langsung ke tahap perekomendasi oleh Direktur.

Benefit Layanan SKE Prioritas

1. Pelaku usaha **lebih cepat mendapatkan SKE**
2. Lebih cepat **mengakses pasar** negara tujuan
3. Meningkatkan aktivitas ekspor

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Percepatan Pelayanan Publik

Asistensi Regulatori Pelayanan Publik Sertifikasi CDOB

BPOM menggelar asistensi regulatori dengan tema "Tingkatkan Kepatuhan dan Kemandirian Obat dan Bahan Obat Lokal, yang Aman, Berkhasiat dan Bermutu" di Surabaya, 24-25 Februari 2025. Kegiatan ini berkolaborasi dengan dengan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Jawa Timur, berupa sharing session pengawasan distribusi obat, bimbingan teknis SMART CDOB 4.0, Desk CAPA Sertifikasi CDOB.

Tujuannya untuk mendorong pelaku usaha meningkatkan komitmennya dalam kepatuhan regulasi mengingat obat adalah komoditi penting bagi kesehatan. Dalam kesempatan tersebut Kepala BPOM juga memberikan apresiasi kepada 5 PBF di Jawa Timur melalui penyerahan Sertifikat CDOB. Kolaborasi ini sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam bersinergi dengan lintas sektor untuk bersama memastikan keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar di Indonesia melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Penguatan Penindakan

Patroli Siber Perangi Produk Ilegal

Patroli siber obat dan makanan merupakan upaya pengawasan aktif di dunia maya untuk memerangi peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Melalui pemantauan platform digital, media sosial, dan e-commerce, tim patroli siber BPOM menelusuri penjualan obat dan makanan yang tidak sesuai ketentuan, serta menindak pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

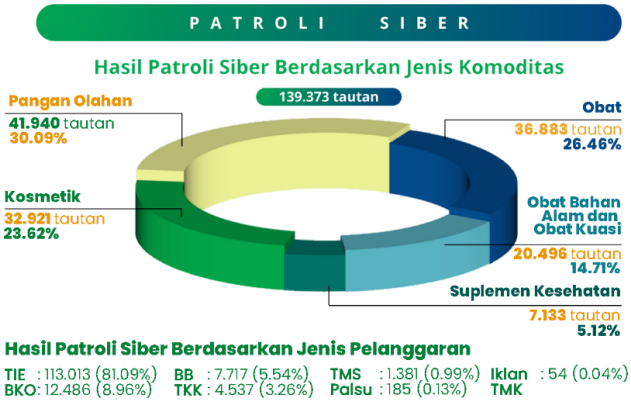

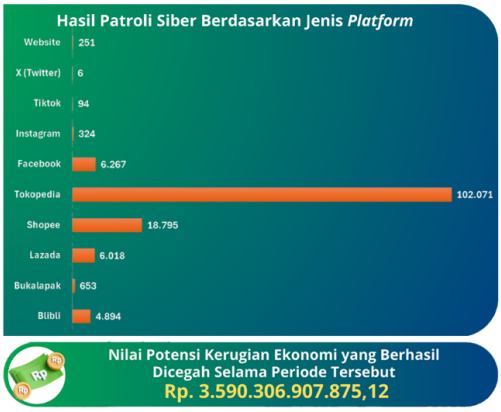

Pemanfaatan Laboratorium Forensik Digital

Laboratorium Forensik Digital BPOM berperan penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengungkap bukti-bukti elektronik terkait pelanggaran di ranah siber. Tim patroli siber melakukan analisis penjejakan digital di Laboratorium Forensik Digital BPOM.

Melalui investigasi digital terhadap perangkat, jaringan, dan jejak digital pelaku, laboratorium ini membantu menelusuri asal-usul peredaran produk ilegal, mengungkap modus operandi, serta memperkuat penegakan hukum. Laboratorium Forensik Digital BPOM berhasil mempertahankan status akreditasi Surveillance ISO/IEC 17025/2017. Berkat kinerjanya, Laboratorium Forensik Digital BPOM berhasil memperoleh predikat Sangat Baik pada Uji Profisiensi dari AFDI bekerjasama dengan BSN.

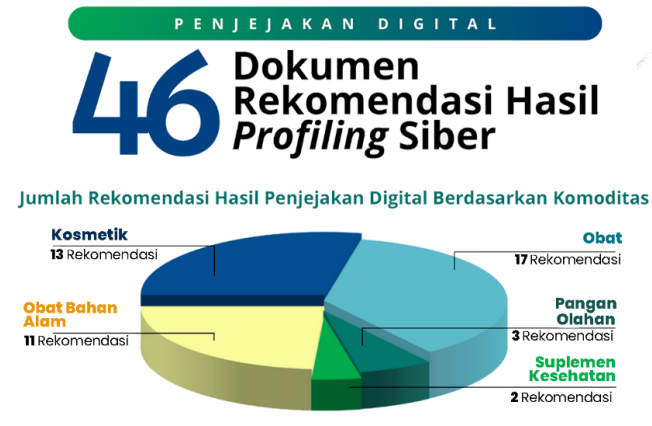

BPOM bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan anggur impor shine muscat yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hal ini disampaikan pada Konferensi Pers Keamanan Pangan Anggur Shine Muscat yang Beredar di Indonesia, Senin (04/11/2024) di Kantor Bapanas.

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan pemusnahan barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat tertentu ilegal, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang, Jumat (13/12/2024). Temuan barang bukti yang berhasil disita petugas mencakup lebih dari 1,09 miliar tablet obat jadi; 404 karung dan 83 drum bahan baku; serta 45 karung, 17.478 botol, 1.192 rol aluminium foil, dan 17.195 karton kemasan. Selain itu juga disita peralatan produksi berupa 18 unit mesin dan 2 unit truk. Total nilai keekonomian temuan di Semarang ini diperkirakan mencapai sekitar 317 miliar rupiah.

Selama Oktober hingga November 2024, BPOM berhasil menemukan 235 item kosmetik ilegal dan/atau berbahaya senilai lebih dari Rp8,91 miliar di 4 wilayah utama di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers yang digelar Senin (30/12/2024) mengatakan temuan ini menjadi gambaran nyata bahwa peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Wilayah Jawa Barat mencatatkan nilai temuan terbesar, yaitu Rp4,59 miliar, disusul Jawa Timur Rp1,88 miliar, Jawa Tengah Rp1,43 miliar, dan Banten Rp1,01 miliar.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Penguatan Penindakan

Kolaborasi Pengawasan Produk Ilegal

Berbagai kegiatan kolaborasi juga terus dilakukan untuk mengorkestrasi penguatan penindakan atas kejahatan obat dan makanan. Setidaknya ada 6 kegiatan termasuk pengungkapan kasus peredaran obat dan makanan ilegal. Selain itu, BPOM juga menggandeng Indonesian E-Commerce Association (iDEA) dan *marketplace* untuk memperkuat pengawasan produk ilegal di peredaran online.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Penguatan Penindakan

Cegah Tangkal Ungkap Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Hingga Agustus 2025, BPOM telah melakukan cegah tangkal produk ilegal melalui pemetaan 5049 data kerawanan kejahatan obat dan makanan 10 analisis kejahatan obat dan makanan, serta 6 kegiatan kolaborasi bersama pemangku kepentingan. Data kerawanan kejahatan obat dan makanan menunjukkan tren peredaran produk ilegal di seluruh wilayah unit pelaksana teknis (UPT) BPOM.

Melalui pemantauan yang intensif, ditemukan berbagai jenis pelanggaran di setiap komoditas obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Data ini menjadi acuan penting bagi BPOM untuk mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan yang lebih efektif terhadap kejahatan obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat..

10 Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

- Analisis Penyampaian Informasi Kewaspadaan Peredaran Obat Ilegal dan Palsu Berdasarkan Hasil Pengawasan BPOM dan Peringatan Otoritas Internasional
- Analisis Fenomena Penambahan Obat - Obat Tertentu (OOT) dalam Produk Obat Bahan Alam
- Analisis Penyalahgunaan Notifikasi Kosmetik: Modus, Dampak dan Strategi Penanggulangannya
- Analisis Struktur dan Penyebab Terjadinya Peredaran Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung Bahan Kimia Obat di Indonesia
- Analisis Peredaran Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Indonesia ke Luar Negeri
- Analisis Evaluasi Sensori Produk Minuman Cokelat Instan sebagai Basis Data Pencegahan Peredaran Minuman Cokelat Instan Ilegal pada Wilayah Perbatasan Indonesia
- Analisis Kerawanan Kejahatan Tahun 2024.
- Analisis Melacak Obat di Luar Jalur Resmi: Urgensi Sampling di Sarana Tidak Berizin Untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Obat.
- Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Pemutih Ilegal Dr. Lee Soo Wook (Dr. LSW) Melalui Media Online di Indonesia
- Kajian Pencegahan Kejahatan Pangan Olahan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Izin Edar Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku

5049
Data Kerawanan Kejahatan

6 Penggalangan Pemangku Kepentingan

- Indonesia Korea Joint Symposium for Pharmaceutical Cooperation, 11 September 2024 - MFDS South Korea
- FGD Kolaborasi BPOM dan Perkosmi dalam Penanganan Perkosmi Kosmetik Ilegal di Peredaran, 23 September 2024 - PERKOSMI
- Penggalangan melalui Workshop Green Research and Opportunities with BPOM (GROW BPOM) Alternatif Formalin, 22 Oktober 2024 – Balai POM di Bogor
- Penggalangan Stakeholder dalam Produksi dan Pemanfaatan Obat dan Makanan yang Aman, Bermutu dan Berkhasiat, 4 November 2024 – Balai POM di Samarinda
- Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dengan Lintas Sektor di Wilayah Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Peredaran Obat Setelan, 12 November 2024 – Lintas Sektor di Jawa Timur
- Penggalangan Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia (AKKMI)

Analisis Fenomena Kejahatan Antisipasi Pelanggaran

Sebagai upaya pencegahan, BPOM juga menganalisis kejahatan obat dan makanan. Analisis didasarkan pada fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan hasil pengawasan BPOM maupun otoritas internasional. Kajian dilakukan secara khusus per komoditi seperti obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan obat bahan alam (OBA) mengandung bahan kimia obat (OBA).

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Grand Design Labolatorium

Launching Grand Design Penguatan Laboratorium

Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Untuk memperkuat fungsi ini, BPOM telah menyusun Grand Design Laboratorium Pengawasan sebagai fondasi pengembangan sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif.

Grand design ini menekankan pentingnya integrasi jejaring laboratorium secara nasional, penerapan teknologi digital, serta pendekatan yang ramah lingkungan. Melalui langkah ini, laboratorium pengawasan diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika perkembangan produk, risiko kesehatan, dan tuntutan regulasi di era globalisasi.

> **Menurut Kepala BPOM, Laboratorium adalah jantung dari sistem pengawasan BPOM. Dengan penguatan yang dirancang dalam grand design ini, BPOM tidak hanya menjawab tuntutan masyarakat tetapi juga memperkuat peran Indonesia di kancah pengawasan internasional.**

> **Kepala BPOM menegaskan bahwa pengawasan ATMPs bukan hanya soal keamanan dan mutu, tetapi juga tentang visi bangsa menghadapi masa depan pengobatan yang lebih canggih, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan.**

65%

Kepala BPOM memaparkan bahwa saatini 65% obat yang digunakan secara global merupakan produk biologi, yang menandakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi dalam regulasi dan pengawasan. Forum tersebut menjadi platform untuk menggali masukan dari para ahli yang dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan ATMPs.

Dukungan BPOM terhadap ATMPs

BPOM mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghadapi tantangan pengawasan produk *Advanced Therapy Medicinal Products* (ATMPs). Langkah ini mencakup modernisasi fasilitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan regulasi yang lebih adaptif. Laboratorium kini dilengkapi instrumen berteknologi tinggi seperti Next Generation Sequencing (NGS), RT-PCR, flow cytometer, dan High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS), yang memungkinkan pengujian lanjutan terhadap produk ATMPs. Fasilitas pendukung lainnya meliputi ruang laboratorium dengan standar Biosafety Level (BSL) 2 dan 3, Laboratorium Hewan Uji, serta Ruang BioClean. Dengan penguatan ini, Laboratorium BPOM mampu memberikan dukungan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap produk ATMPs di Indonesia.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Grand Design Labolatorium

Pengembangan Jejaring Laboratorium

Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) ditetapkan sebagai ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Additives pada sidang ke-19 Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG). Penetapan ini tidak hanya menjadi bukti kredibilitas Indonesia dalam pengawasan pangan, tetapi juga memperkuat peran strategis Indonesia dalam mendukung keamanan dan kualitas pangan bagi lebih dari 600 juta pendudukdi kawasan ASEAN.

Dalam bidang obat bahan alam (OBA), BPOM mengembangkan Jejaring Laboratorium Pengawasan Obat Bahan Alam (JLPOBA) sebagai platform untuk berbagi informasi, memperluas cakupan pengawasan, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi. Melalui jejaring ini, dilakukan peningkatan kompetensi, harmonisasi metode analisis, dan pemastian mutu serta keamanan OBAsecara lebihterintegrasi.

Sementara itu, di sektor kosmetik, BPOM menunjukkan komitmen penguatan pengawasan melalui pengembangan Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI). Jejaring ini berfokus pada standarisasi metode pengujian yang sejalan dengan kualitas global, menjadikan BPOM sebagai institusi yang adaptif terhadap perkembangan industri kosmetik sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat referensi pengujian kosmetik di kawasan ASEAN.

Pada bulan Juli 2025, disektor baku pembanding telah dilaksanakan jejaring internasional “The 17th Meeting on the Production of ASEAN Reference Substance”. Sejak tahun 1980 PPPOMN telah berkolaborasi dengan 10 negara ASEAN untuk mengembangkan ARS (ASEAN Reference Standard) yang digunakan untuk kebutuhan negara-negara anggota. The 17th Meeting on the Production of ARS bertujuan mendiskusikan progres, status dan kelanjutan proyek serta permasalahan terkini dari masing-masing anggota; memperkuat kapabilitas dan mendiskusikan peningkatan produksi ARS sesuai dengan ISO 17034:2016, mengusulkan dan mendiskusikan rencana aksi ASEAN Reference Substances Working Group (ARSWG). Pada pertemuan ini juga disampaikan pentingnya untuk melanjutkan kolaborasi dalam pengembangan dan produksi ARS.

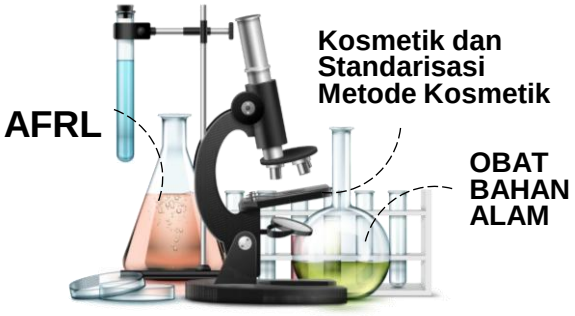

Pengembangan Jejaring **Laboratorium**

Regionalisasi Laboratorium

Pada tahun 2025, BPOM memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah Indonesia Timur melalui pembentukan Laboratorium Regional Jayapura. Penambahan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan POM No. 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan POM, sehingga jumlah laboratorium regional kini menjadi delapan, yaitu Medan, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado, dan Jayapura. Penyempurnaan sistem regionalisasi laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengujian secara lebih merata dan responsif, sesuai dengan tugas dan ruang lingkup pengawasan di masing-masing wilayah.

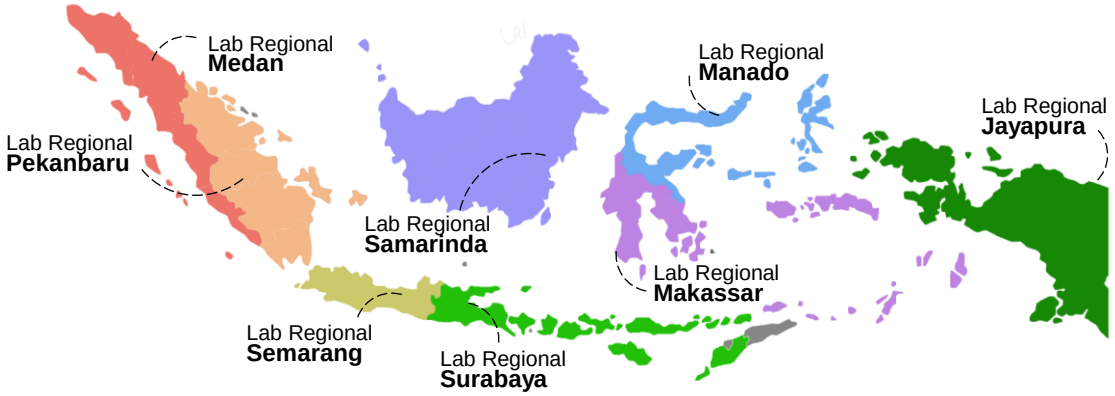

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Grand Design Labolatorium

Pengembangan Metode Analisis Pengujian

Metode analisis (MA) merupakan prosedur sistematis yang dikembangkan oleh BPOM untuk menjamin keakuratan pengujian berbagai produk, seperti obat, NAPZA, obat tradisional, kosmetik, pangan, hingga produk biologi dan mikrobiologi. Seiring meningkatnya peredaran produk, kebutuhan pengawasan yang cepat dan andal juga semakin tinggi, terutama saat muncul isu terkait keamanan, khasiat, atau mutu. Dalam kondisi tertentu, metode analisis belum tersedia untuk kasus-kasus baru (emerging issues), sehingga diperlukan respons cepat dari BPOM dalam mengembangkan metode yang valid. Hasil pengujian yang tepercaya menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan strategis dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Layanan Penyediaan Baku Pembanding untuk Pengujian

Layanan Baku Pembanding BPOM kini dilaksanakan secara digital melalui aplikasi INFALABS, yang memudahkan akses bagi pelanggan dan pelaku usaha. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan ini, tidak hanya karena kemudahan pemesanan, tetapi juga karena kualitas Baku Pembanding yang dihasilkan. Pengakuan terhadap kualitas ini dibuktikan dengan keterlibatan BPOM dalam pengembangan International Chemical Reference Substance (ICRS) bersama WHO pada tahun 2024, yang menunjukkan pengakuan di tingkat internasional.

Perbandingan Nilai SKM

Nilai SKM **2024**

96.67

Nilai SKM **2023**

95.73

Layanan **Hewan Uji**

Layanan **Baku Pembanding Kimia**

Layanan **Uji Profisiensi**

Layanan **Kalibrasi Alat**

Layanan **Pengujian**

Layanan **Pelatihan Teknis Laboratorium**

Layanan **Penyediaan Baku Mikroba**

Layanan **Lot Release Vaksin**

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Grand Design Labolatorium

Pilot Project Rekognisi Laboratorium

Peran laboratorium eksternal sebagai penyedia fasilitas pengujian sangat penting dalam mendukung industri farmasi, khususnya dalam menjamin keamanan dan mutu produk. Namun, diperlukan verifikasi terhadap kapasitas dan kompetensi teknis laboratorium tersebut agar pengujian sediaan farmasi yang dilakukan sesuai dengan persyaratan kompendial yang berlaku. Untuk itu, BPOM melaksanakan pilot project rekognisi laboratorium eksternal sebagai upaya memastikan kesesuaian teknis dan mendorong kolaborasi pengujian yang andal guna memperkuat sistem pengawasan mutu obat di Indonesia.

PILOT PROJECT REKOGNISI LABORATORIUM

Pada tahun 2024 PPPOMN telah melaksanakan Pilot Project Rekognisi 4 laboratorium Eksternal, dan telah dilakukan kunjungan verifikasi ke laboratorium:

- **PT. Clinisindo Laboratories**
- **PT. Saraswanti Indo Genetech (PT. SIG)**
- **Laboratorium Jasa Pengujian dan Penelitian (QLab)** Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
- **Laboratorium Pelayanan Pengujian Mutu** Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Hasilnya setelah dievaluasi:

- **2 laboratorium** yang memiliki **Predikat Baik** dengan tingkat **Maturitas level 3**
- **1 laboratorium** memperoleh **Predikat Cukup** dengan tingkat **Maturitas level 2**
- **1 laboratorium** memperoleh **Predikat Kurang** dengan tingkat **Maturitas level 1**

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Grand Design Labolatorium

Green Laboratory

Pada tanggal 26 Juni 2025, Kepala BPOM Bapak Taruna Ikrar secara langsung menyerahkan penghargaan bagi laboratorium-laboratorium terbaik dalam ajang Green Laboratory Forum and Awards BPOM. Acara penghargaan ini digelar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, dan menjadi salah satu bukti nyata bahwa laboratorium BPOM siap menjawab tantangan global. Lomba Implementasi Green Laboratory BPOM 2025 telah diikuti oleh 38 laboratorium dari total 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Para peserta dinilai oleh Tim Green Laboratory PPPOMN dengan empat aspek utama: efisiensi energi, efisiensi air, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta pengelolaan material. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengumpulan data pada April – Mei 2025 hingga tahap verifikasi lapangan melalui visitasi. Dari tahap penilaian ini, dipilih 10 laboratorium dengan skor tertinggi, lalu disaring lagi menjadi lima terbaik.

Juara Umum diraih Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, disusul BBPOM di Palangka Raya sebagai Runner Up. Piagam diserahkan langsung oleh Taruna Ikrar kepada Sofiyani Chandrawati Anwar dan Ali Yudhi Hartanto, pimpinan dari masing-masing UPT pemenang. Selain penghargaan umum, BPOM juga memberikan apresiasi untuk kategori penilaian khusus. BBPOM Palangka Raya meraih penghargaan Efisiensi Energi, BBPOM Medan untuk Efisiensi Air, BBPOM Banjarbaru pada Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan, BBPOM Mataram di kategori Sumber dan Siklus Material, serta Inovasi Terbaik diraih BBPOM Jakarta.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi laboratorium lainnya untuk bergerak ke arah yang sama. Masih ada 38 laboratorium UPT yang sekarang sedang dipetakan. Dalam dua tahun ke depan, diharapkan implementasi green laboratory bisa diterapkan secara menyeluruh.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Kerja Sama Lintas Sektor

Sinergi untuk Ekosistem Uji Klinik Berkualitas dengan BRIN dan Kemenkes

BPOM menyelenggarakan forum lintas sektor bertema *"A Blueprint for Innovation Success: Kualitas Sentra dan Pelaku Uji Klinik Optimal dalam Pencanangan dan Perwujudan Perjanjian Kerja Sama BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)."* Forum ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen ketiga lembaga untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelaksanaan uji klinik di Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada 19 Juli 2024.

Sebagai langkah nyata, forum ini juga menandai peluncuran integrasi data uji klinik antara BPOM dan *Indonesia Clinical Research Registry* (INA-CRR) milik Kementerian Kesehatan, serta penyusunan *roadmap* kolaboratif sebagai panduan aksi bersama. Melalui sinergi ini, Indonesia bergerak menuju terbentuknya ekosistem uji klinik yang lebih kuat, berkualitas, dan mendukung kemajuan riset serta inovasi di bidang kesehatan.

Penandatanganan MoU dengan IPB

Penguatan kebijakan pengawasan obat dan makanan memerlukan kolaborasi lintas sektor antara berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dan regulator. Perguruan tinggi berkontribusi melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pemerintah berperan dalam merumuskan regulasi yang efektif untuk memastikan pengawasan yang optimal.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, BPOM melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman denganInstitut Pertanian Bogor (IPB University). Kerja sama ini menjadi fondasi baru bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang obat dan makanan, serta menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret guna memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengadakan konferensi pers bersama di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (11/12/2024). Konferensi pers ini menunjukkan komitmen bersama antara BPOM dan Kejaksaan Agung dalam memperkuat langkah penindakan terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding/MoU) di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Selasa (26/11/2024). Nota kesepahaman ini berisi tentang koordinasi tugas dan fungsi kedua lembaga dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan audiensi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko di Gedung BJ Habibie, Jakarta pada Selasa (10/12/2024). Dukungan BPOM terhadap pengembangan produk riset, termasuk zat baru yang digunakan dalam obat dan makanan menjadi penting. Hasil riset ini diharapkan akan menjadi produk yang memenuhi syarat untuk memperoleh izin edar dari BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menandatangani Nota Kesepahaman terkait Sinergitas Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (23/1/2025) di kantor BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa dan PDT) Yandri Susanto menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Desa dan Daerah Tertinggal pada Kamis (27/2/2025) di kantor Kemendesa dan PDT.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Kerja Sama Lintas Sektor

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN dan BIN

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandai komitmen bersama dalam memperkuat keamanan informasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPOM dan BSSN tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam implementasinya, keamanan siber dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan sinergi berkelanjutan antar lembaga, guna menjaga integritas data dan kelancaran operasional sistem informasi di lingkungan BPOM.

Selain itu, BPOM juga menjalin kerja sama strategis dengan Badan Intelijen Negara (BIN) melalui penandatanganan PKS mengenai Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber di Lingkungan BPOM. Sinergi antara BPOM, BSSN, dan BIN menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh, aman, dan terpercaya di era digital.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Kerja Sama Lintas Sektor

GERMAS SAPA Budayakan Hidup Sehat

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) merupakan program berbasis komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pangan di sepanjang rantai pangan. Program terpadu ini mencakup sejumlah program yang telah lebih dulu diinisiasi BPOM yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Pelaksanaan intervensi dilakukan di sisi supply yaitu melalui kegiatan pendampingan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel dan sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan pangan.

Ketiga program Germas Sapa telah menghasilkan sejumlah capaian. Capaian Program Germas Sapa tahun 2020-2024 sebanyak 1.106 Desa/Kelurahan, 453 Pasar, dan 17.318 Sekolah (full intervensi: 3518 Sekolah dan Sekolah perluasan/ sosialisasi: 13.800 Sekolah) telah diintervensi melalui program Germas Sapa.

Selain itu, program ini terus diperluas seperti integrasi program Desa Pangan Aman dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal. Kick off program berlangsung di Desa Kalurahan Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, (14/10/2024).

Sinergi ini bertujuan untuk memastikan PMT Berbahan Pangan Lokal dapat memenuhi aspek keamanan, mutu dan gizi pangan dan juga memberdayakan usaha pangan di desa untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga perekonomian masyarakat desa meningkat.

Perluasan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan melalui kegiatan Pelatihan Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan, Kolaborasi ini bertujuan agar Aparatur perdagangan memiliki pengetahuan terkait keamanan pangan, sehingga dapat memastikan keamanan pangan di wilayah kerjanya.

Perluasan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi keamanan pangan bersama Kemendikdasmen, BPOM, Kemenkes, serta berbagai instansi terkait. Peta kompetensi berisi topik keamanan pangan yang tercantum pada elemen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan fokus area Gizi dan aktifitas fisik. Selain penyusunan peta kompetensi, dilakukan juga penyusuan modul terkait Kantin Sehat yang di koordinasikan oleh Kemendikdasmen dan pendampingan oleh Unicef.

Supply Side

Peredaran:
Ritel Tradisional
(Pasar, Toko dan Warung)
Ritel Modern
(Mini Market, Sentra Oleh-Oleh, dll)

Pemberdayaan UMK Desa:
Pangan Segar
Pangan Olahan
Pangan Siap Saji

Demand Side

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Komunitas
Sekolah, Keluarga, Remaja

Kepala BPOM Taruna Ikrar menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan 19 perguruan tinggi sekaligus meluncurkan secara resmi program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)–Merdeka Belajar Kampus Merdeka Platform Universitas, yang berlangsung di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, Senin (9/12/2024).

BPOM dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) baru saja menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Pesantren di Bidang Obat dan Makanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf secara resmi merilis kerja sama tersebut di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Kerja Sama Lintas Sektor

BPOM Menyapa Maluku

#BPOMMenyapaMaluku pada 30 November – 1 Desember 2024 dengan rincian:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bertajuk #BPOMMenyapaPelajar telah dilaksanakan di SMA Negeri 6 Ambon dengan tema "Generasi Muda Sehat dengan Obat dan Makanan Aman". Kepala BPOM menyampaikan edukasi terkait Obat dan Makanan pada kegiatan KIE yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov. Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku dan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Maluku, serta 350 orang pelajar dan guru.

2. #BPOMMenyapaStakeholder dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Maluku dan menghasilkan Rencana Aksi Pengawasan Obat dan Makanan dan penyerahan sertifikat GMP dan NIE kepada Pelaku Usaha UMKM Obat dan Makanan di Provinsi Maluku.

3. #BPOMMenyapaUPT pada Minggu, 1 Desember 2024 dilaksanakan di kantor Balai POM di Ambon yang diisi dengan penanaman pohon pala, meninjau laboratorium dan pembangunan gedung layanan publik. Kegiatan ini dihadiri oleh Pegawai Balai POM di Ambon dan perwakilan pegawai Loka POM di Tanimbar.

4. Desk konsultasi pelaku usaha melalui kegiatan #BPOMMenyapaUMKM, telah dihasilkan 1 Notifikasi Kosmetik dan 1 Persetujuan Denah Sarana Kosmetik. Selain itu, Kepala BPOM juga mengunjungi sarana produksi pangan olahan dan kosmetik di Desa Negeri Rutong, Maluku.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

PROGRES PENGUSULAN PENYESUAIAN TUKIN BPOM

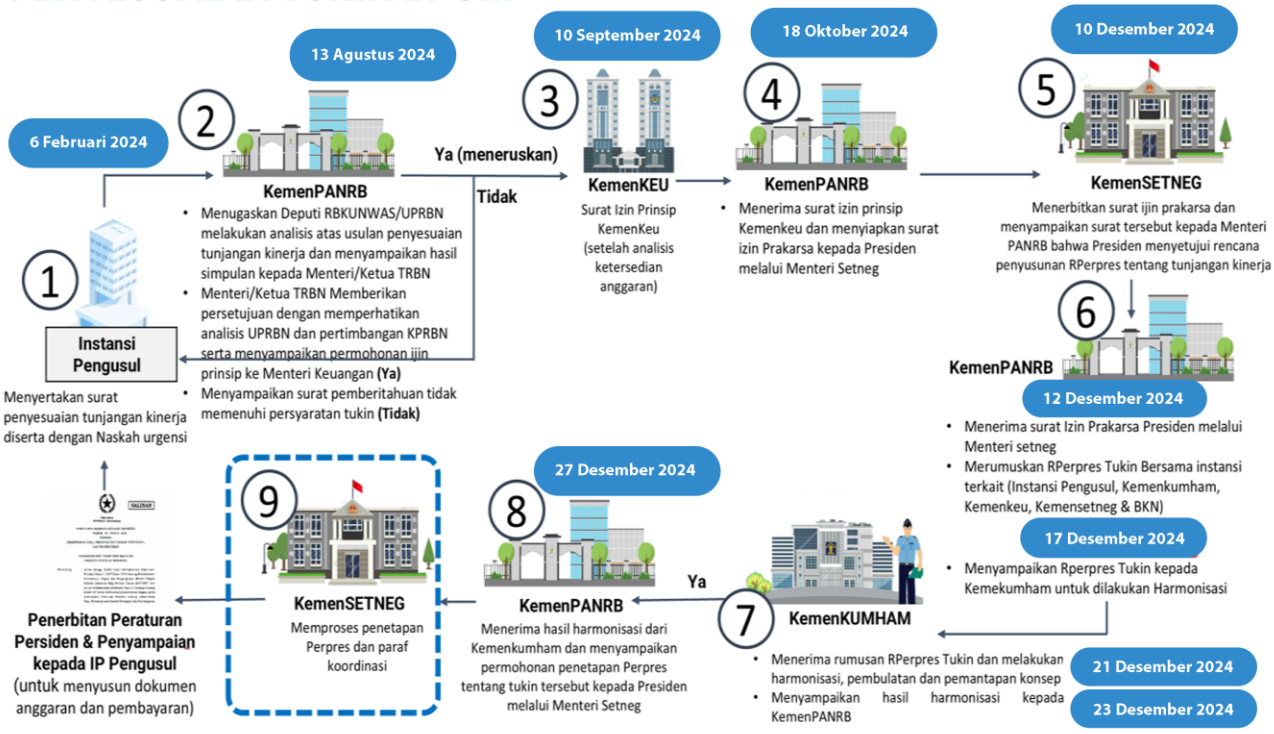

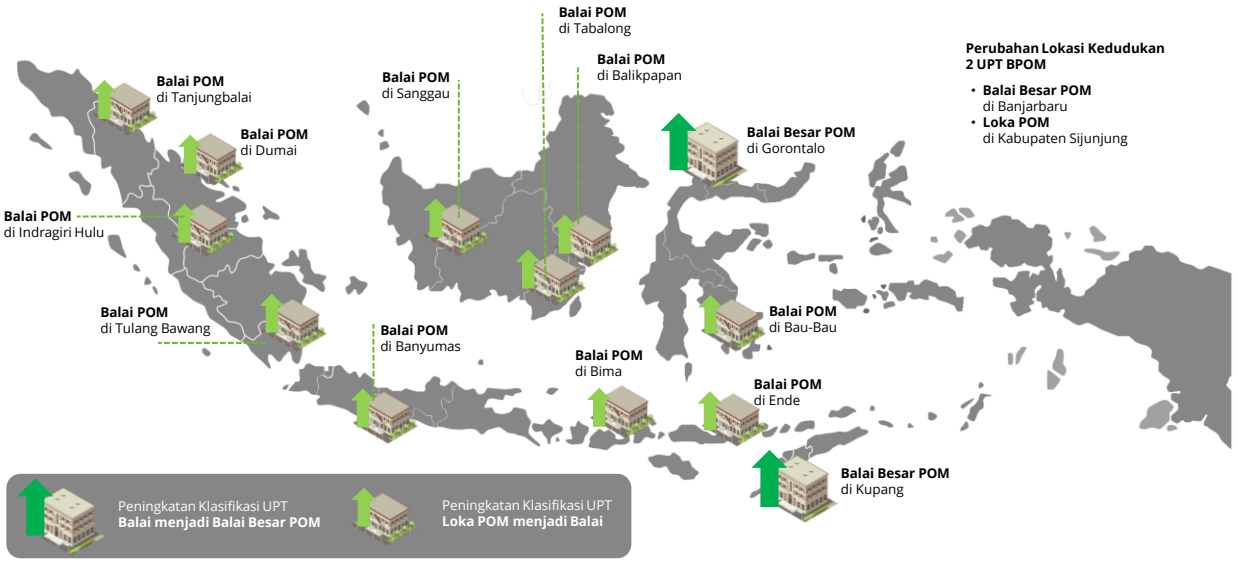

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Strategi Kepemimpinan dan Manajemen SDM dalam Kerangka Implementasi Ekonomi Sirkular

BPOM mengadopsi konsep kepemimpinan yang mengintegrasikan pendekatan neuro leadership. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesehatan dan fungsi otak dalam membentuk pemimpin yang efektif adaptif dan mampu mengambil keputusan strategis secara berkelanjutan Melalui pemahaman mekanisme kerja otak BPOM mendorong pengembangan kepemimpinan yang mendukung transformasi organisasi menuju implementasi ekonomi sirkular secara optimal

Pendidikan Lanjutan dan Pengembangan Kompetensi Global BPOM

Badan POM berkomitmen dalam melakukan pengembangan kompetensi pegawai baik melalui program pendidikan lanjutan maupun pelatihan. Pendidikan lanjutan diberikan kepada pegawai BPOM yang memuhi persyaratan untuk jenjang sarjana, magister, atau doktoral, baik di universitas dalam negeri maupun di dalam negeri. Untuk mendukung persiapan pegawai dalam mengikuti seleksi dan memperoleh beasiswa, khususnya untuk pendidikan di luar negeri, BPOM menyelenggarakan kegiatan Bootcamp Scholarship pada bulan Oktober 2025 yang diikuti oleh 35 peserta. BPOM juga aktif mengirimkan pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi luar negeri, berupa pelatihan ataupun seminar. Beberapa kegiatan yang sudah pernah diikuti oleh pegawai BPOM diantaranya Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA Jepang), Pelatihan Multilateral RRT, dan Pelatihan Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP). Selain keikutsertaan pelatihan di luar negeri, BPOM juga menyelenggarakan kegiatan workshop yang diikuti oleh pegawai di unit kerja pusat maupun UPT dengan menghadirkan narasumber dari luar negeri, seperti kegiatan Workshop Value of Pharmacopeial Standards bekerja sama dengan United States Pharmacopeia (USP) dan kegiatan Workshop Beyond Borders: Tackling Emerging Threats of Counterfeit Medicine in Public Health bekerjasama dengan Pharmaceutical Security Institute (PSI).

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia

BPOM turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang kefarmasian. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui pemberian pembekalan kepada calon apoteker melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini telah dilaksanakan 2 (dua) periode, yaitu pada bulan April dan bulan September tahun 2025 sebagai upaya mendukung pengembangan kompetensi profesional apoteker sebelum terjun ke dunia kerja.

Pengembangan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

BPOM terus berupaya meningkatkan kompetensi pengawas pangan daerah dalam rangka mendukung keamanan pangan dan daya saing UMKM Upaya ini dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior, yang bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pengawasan pangan yang efektif dan berbasis risiko.

PPSDM POM melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di daerah sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pelatihan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Pelatihan PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) angkatan di beberapa kota antara lain Solo, Makassar, Denpasar, Palangkaraya, Yogyakarta, Batam, Surabaya, Padang, Banten, dan Jakarta, dengan total peserta untuk masing-masing pelatihan adalah sebanyak 300 (tiga ratus) peserta.

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Dialog Kepala BPOM dan Leader Dialogue

Dalam rangka memperkuat budaya kerja BerAKHLAK Kepala BPOM mengadakan dialog bersama para Agen Perubahan di lingkungan BPOM untuk mendorong pertukaran pengalaman dalam menginternalisasikan nilai nilai inti BerAKHLAK serta memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola organisasi yang berintegritas. Sebagai kelanjutannya BPOM juga menyelenggarakan kegiatan Leader Dialogue dan telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Leader Dialogue pertama bertema Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membangun Budaya BerAKHLAK di Lingkungan BPOM dengan narasumber seorang psikolog senior yaitu Rahmat Ismail. Sedangkan dialogue kedua diselenggarakan dengan tema Integritas dalam Kepemimpinan: Menggerakkan Perubahan melalui teladan dan tindakan.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM POM melalui Sertifikasi

BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam pengawasan obat dan makanan Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Sertifikasi SDM POM, yang bertujuan memperkuat peran dan kompetensi personel pengawas khususnya Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Inspektur Pangan. Program ini dirancang untuk memastikan SDM POM memiliki standar keahlian yang andal guna mendukung pengawasan yang efektif dan berdaya saing.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Kunjungan Sekolah atau Universitas ke Lingkungan BPOM Pusat

BPOM membuka kesempatan bagi sekolah atau universitas untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi BPOM melalui kegiatan kunjungan. Pada periode Januari hingga September 2025 BPOM telah menerima kunjungan dari berbagai perwakilan mahasiswa dan pelajar antara lain dari:
Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, SMK Wicaksana Al- Hikmah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, SMP N 199 Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI), Politeknik Bhakti Setia Indonesia dengan total 401 Peserta baik Mahasiswa/Siswa.

Penilaian Kompetensi Melalui Perbandingan Antara Capaian Kompetensi Pegawai dan Persyaratan Dengan Standar Kompetensi

Untuk mengidentifikasi SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi dilakukan penilaian kompetensi dengan membandingkan capaian kompetensi pegawai terhadap persyaratan standar yang ditetapkan. Pada periode Januari hingga September 2025 kegiatan penilaian kompetensi meliputi pemetaan kompetensi di berbagai unit kerja. Kegiatan ini diikuti oleh 1302 pegawai dan dilaksanakan secara daring Selain itu dilakukan juga Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF PFM) bagi 376 pegawai pada periode Uji Kompetensi hingga September 2025..

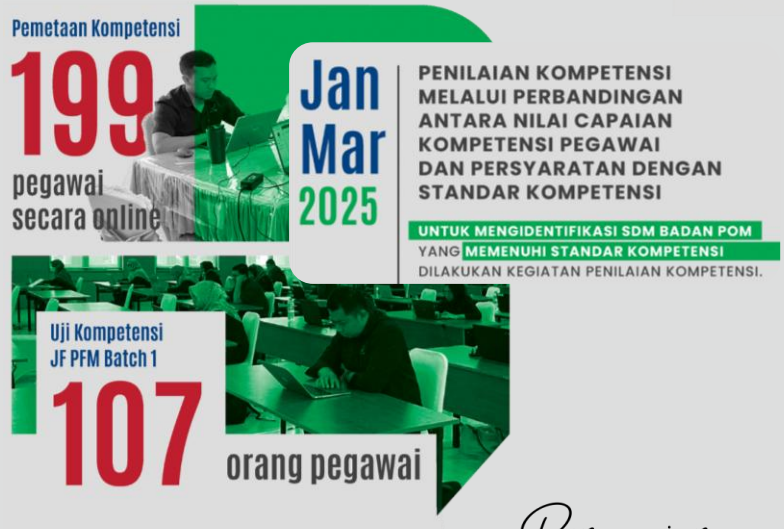

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Pengembangan Kompetensi Dalam Negeri (Pelatihan Fungsional dan Teknis)

Total capaian pelatihan hingga bulan Oktober 2025 mencapai **1.123 peserta**, yang mencerminkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi SDM secara berkesinambungan dan terarah.

Kegiatan pelatihan dimulai pada **Februari** dengan total **142 peserta**, meliputi:
- Pelatihan Food Inspector Dasar Bets 1 (40 peserta)
- Pelatihan Food Inspector Dasar Bets 2 (39 peserta)
- Pelatihan JF Arsiparis Penjenjangan (2 peserta)
- Pelatihan JF Analis Kebijakan Mastering (1 peserta)
- Pelatihan JF Penata Laksana Barang Penjenjangan (4 peserta)
- Tugas Belajar (6 peserta)
- Webinar Scholarship (50 peserta)

Pada **Maret**, terdapat **84 peserta** yang mengikuti:
- Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 1 Bets 1 (40 peserta)
- Pelatihan PKP Pertama bagi Asesor LSP (24 peserta)
- Pelatihan DFI Bets 1 (Asesor dan WI) (20 peserta)

Memasuki April, jumlah peserta meningkat menjadi 175 peserta, melalui:
- Pelatihan CDOB Junior (79 peserta)
- Pelatihan DFI Junior Bets 1 (17 peserta)
- Pelatihan Arsiparis Penjenjangan (1 peserta)
- Webinar Scholarship (78 peserta)

Pada **Mei**, tercatat **155 peserta** melalui:
- Pelatihan DFI Bets 1 (Asesor) (20 peserta)
- Pelatihan Food Inspector Muda (80 peserta)
- Webinar Scholarship (55 peserta)

Kegiatan berlanjut di Juni dengan total 77 peserta, terdiri dari:
- Pelatihan DFI Bets 3 (Asesor) (25 peserta)
- Pelatihan DFI Junior Bets 5 (Pemda) (24 peserta)
- Webinar Scholarship (28 peserta)

Puncak capaian terjadi pada **Juli** dengan **188 peserta**, mengikuti:
- Pelatihan Inspektur CDOB Tingkat Senior Bets 1 dan 2 (masing-masing 39 peserta)
- Pelatihan Auditor Internal (41 peserta)
- Webinar Scholarship (69 peserta)

Pada Agustus, pelatihan diikuti oleh 78 peserta, melalui:
- Pelatihan Food Inspector Dasar Bets 3 (40 peserta)
- Pelatihan Inspektur OBASK Junior Bets 1 (38 peserta)

Sementara itu, **September** mencatat **164 peserta** pada kegiatan:
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Bets 1 (30 peserta)
- Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior Bets 2 (28 peserta)
- Pelatihan KIE Tingkat Kesulitan 2 (30 peserta)
- Pelatihan Advokasi Kebijakan (76 peserta)

Adapun pada Oktober, kegiatan diikuti oleh 60 peserta, melalui:
- Pelatihan Analis Regulasi Obat dan Makanan Junior (30 peserta)
- Webinar Scholarship (30 peserta)

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan peningkatan kompetensi aparatur yang konsisten, dengan variasi program pelatihan teknis dan fungsional yang mendukung profesionalisme dalam pengawasan obat dan makanan.

IELTS Prediction Test untuk Peningkatan SDM Pengawas Obat dan Makanan yang Berdaya Siang Global

IELTS Prediction Test ini merupakan bentuk dukungan bagi pegawai yang akan mengikuti studi atau pelatihan, khususnya di luar negeri, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas SDM Pengawas Obat dan Makanan yang kompetitif secara global. BPOM menyelenggarakan kegiatan IELTS Prediction Test sebanyak II Batch dengan peserta dari Unit Kerja Pusat dan UPT. Pada bulan Februari, BPOM menyelenggarakan kegiatan IELTS Prediction Test Batch I dengan jumlah peserta sebanyak 97 peserta dengan rincian 53 peserta luring dan 44 peserta daring. IELTS Prediction Test Batch II diselenggarakan pada bulan Agustus dengan jumlah peserta sebanyak sebanyak 150 peserta yang diikuti baik secara daring maupun luring.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Penerbitan Jurnal Eruditio

Pada Januari 2025 PPSDM POM menerbitkan edisi terbaru Jurnal Eruditio Vol 5 No 1, dan pada September 2025 menerbitkan edisi Jurnal Eruditio Vol 5 No 2 dengan Kepala BPOM sebagai Penanggung Jawab. Dikelola sejak 2020 jurnal ini telah menerbitkan 10 edisi dan 66 artikel yang berfokus pada isu keamanan obat dan pangan didukung oleh tim editorial serta mitra bestari dari berbagai universitas terkemuka. Sebagai bagian dari peningkatan mutu Eruditio berhasil meraih akreditasi SINTA peringkat 5 pada 2024. Hingga 9 Oktober 2025 jurnal ini telah dikunjungi lebih dari 16 000 pembaca dan mencatatkan 178 sitasi serta indeks h sebesar 6 di Google Scholar, menunjukkan kontribusi signifikan sebagai referensi ilmiah di bidangnya.

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

TERAKREDITASI

Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor: 177/E/KPT/2024 Tanggal: 15 October 2024
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024

Nama Jurnal Ilmiah
Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety
E-ISSN
28076222
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 5

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026

Jakarta,
Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M.Faiz Syuaib
NIP. 196708111994021001

Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

BPOM menyelenggarakan kegiatan tahunan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Forkon). Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kebijakan pengawasan obat dan makanan di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Melalui Forkon, BPOM menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan pelaku industri, guna mengidentifikasi topik-topik kajian yang relevan dan prioritas. Forum ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta penerapan standar analisis kebijakan yang diakui secara internasional, demi menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan memperkuat kredibilitas BPOM di tingkat nasional maupun global.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Perkumpulan Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia (PPFMI)

Dalam rangka pertanggungjawaban kepengurusan PPFMI periode 2020 s.d 2025 atas kinerja nya, telah dilakukan Musyawarah Nasional PPFMI yang dihadiri oleh Kepala Badan POM pada tanggal 22 Mei 2025. PPFMI diharapkan mampu memperkuat peran sebagai mitra Badan POM dalam mengawal perlindungan kesehatan masyarakat di tengah laju perubahan global, digitalisasi, dan tantangan baru di bidang pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks dan dinamis. Sebagai upaya penyegaran dan kemajuan kinerja perkumpulan perlu adanya estafet kepemimpina, sehingga Kepala Badan POM telah melakukan pengukuhan kepada pengurus pusat PPFMI pada 16 September 2025 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Badan POM. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadikan PPFMI semakin kokoh sebagai wadah pengembangan profesionalisme Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) menjadi suatu profesi yang kompeten, profesional, dan dinamis.

Bimtek Kompetensi SDM

Dalam mendukung program prioritas nasional Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan peningkatan kompetensi SDM Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar jabatan. Peningkatan kompetensi ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, dan bimbingan teknis, serta diperkuat dengan sertifikasi kompetensi untuk memastikan SDM Pengawas Farmasi dan Makanan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Standar kompetensi berperan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, serta penyusunan SOP pelaksanaan tugas.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional PFM, diharapkan:

1. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas pegawai terkait pengembangan dan pembinaan kompetensi;
2. Optimalnya peran pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan kolaborasi lintas unit;
3. Terwujudnya pembinaan jabatan fungsional yang lebih efektif dan berkelanjutan di lingkungan BPOM maupun instansi pembina lainnya.

Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran BPOM sebagai institusi pembina Jabatan Fungsional PFM, sekaligus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional yang profesional dan berintegritas.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SERTIFIKAT

NOMOR : PB.02.01.9.08.25.385

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor PB.02.01.9.08.25.154 menyatakan bahwa Program Pelatihan Teknis di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan pada:

UPT. PELATIHAN KESEHATAN

MASYARAKAT MURNAJATI

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Teknis di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan kategori Akreditasi B dan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan,

ALI MUHARAM

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Pengelolaan dan Akreditasi Perpustakaann

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa serta pengawasan bidang obat dan makanan, Kepala BPOM berkomitmen untuk menjadikan BPOM sebagai institusi yang berbasis knowledge base dengan menyelenggarakan layanan perpustakaan untuk mendukung program diseminasi informasi dibidang obat dan makanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan BPOM telah meningkatkan layanan perpustakaan dengan melakukan proses akreditasi perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2025 dan menghasilkan perpustakaan BPOM telah sesuai standar dengan mendapatkan nilai Baik (B).

Akreditasi Lembaga Pelatihan

Dalam rangka mendukung BPOM dalam meningkatkan kompetensi pengawas pangan daerah, maka dilakukan penjaminan mutu/kualitas penyelenggaraan pelatihan teknis pengawasan obat dan makanan agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BPOM. Terhitung sejak tahun 2023, PPSDM POM sebagai lembaga pengakreditasi program telah memberikan akreditasi program pelatihan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan kepada 7 (tujuh) lembaga pelatihan. Melalui kegiatan pemberian akreditasi ini, PPSDM POM berkomitmen untuk menjamin mutu, konsistensi, dan kredibilitas lembaga pelatihan di bidang pengawasan obat dan makanan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas lembaga dalam menyediakan program pelatihan yang memenuhi standar mutu penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk Pejabat Eselon II

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung penuh pelaksanaan Program Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Program ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah atau sedang menjabat dalam posisi manajerial sekurang-kurangnya selama satu tahun, tanpa harus mengikuti pelatihan kepemimpinan secara penuh.

Selain itu, program RPL ini juga merupakan bentuk antisipasi terhadap kebijakan nasional yang mengharuskan pejabat mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebelum menduduki jabatan struktural. Melalui program ini, peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat hasil relaksasi RPL yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, serta disetarakan dengan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) PKN II (Pratama).

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, BPOM telah mengikutsertakan dua orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam kegiatan Piloting Relaksasi RPL LAN RI, yang diselenggarakan secara full daring pada tanggal 13 Agustus s.d. 24 September 2025. Melalui partisipasi ini, BPOM berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kompetensi manajerial ASN secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kebijakan nasional.

WHO Face to Face Workshop on Good Regulatory Practices (GRP)

Badan POM bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) menyelenggarakan Face-to-Face Workshop on Good Regulatory Practices (GRP) sebagai bagian dari program Regulatory System Strengthening (RSS). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas regulator dalam penerapan prinsip-prinsip Good Regulatory Practices guna memastikan mutu, keamanan, dan efektivitas produk obat dan kesehatan.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari di Bali dengan metode pembelajaran interaktif, termasuk diskusi dan studi kasus. Sebanyak 24 (dua puluh empat) peserta merupakan Pimpinan dari unit pusat serta Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, bersama narasumber dari WHO Headquarters, WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam penguatan sistem regulatori nasional serta memperkuat kerja sama internasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

World Health Organization
ADB
KOREA
WHO Face to Face Workshop
on Good Regulatory Practices (GRP)
Bali, 24-26 September 2025
WIFI ACCESS

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah senjata utama BPOM untuk mewujudkan akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan tugas pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip clean and good governance. Upaya sistematis BPOM ini diukur melalui Pemeringkatan Monev KIP Tahun 2024 (periode 16 Juli - 21 November 2024), yang menghasilkan data impresif di mana 78,64% (81 dari 103) PPID Pelaksana meraih predikat Informatif. Puncak keberhasilan kolektif ini dibuktikan dengan prestasi PPID Pelaksana Biro Hukum dan Organisasi BPOM yang meraih predikat Informatif dan peringkat Terbaik Pertama. Prestasi ini menjadi bukti kredibilitas BPOM dalam meyakinkan publik terkait keseriusan dan kapabilitas lembaga. Penghargaan yang diterima pada Selasa (3/12/2024) ini merupakan bentuk validasi terhadap konsistensi BPOM dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi yang akurat dan terpercaya.

Dalam semangat tema "Transparansi Kuat, Pengawasan Hebat: Urgensi Revisi UU KIP untuk BPOM yang Lebih Terbuka", Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar pengawasan obat dan makanan yang efektif, di mana transparansi bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan juga bentuk akuntabilitas kepada publik. Peran vital ini diemban penuh oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sekretaris Utama BPOM berkomitmen menjadikan BPOM sebagai Badan Publik Informatif demi pemenuhan hak masyarakat. Komitmen ini menuntut PPID Pelaksana proaktif memahami regulasi (termasuk revisi UU KIP) dan mengimplementasikan kebijakan sesuai wilayah kerjanya. Rakontek PPID yang dilaksanakan pada 29 April 2025 ini menjadi momen pengingat bahwa semangat transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima harus terus dijaga dan dikobarkan secara kolektif. Sebab, keterbukaan informasi bukan hanya bentuk kepatuhan, melainkan wujud integritas BPOM, cerminan kepercayaan publik, serta jembatan yang memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Inovasi KIE

Pentingnya edukasi yang berkelanjutan terkait keamanan obat dan makanan mendorong BPOM untuk terus berinovasi dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai upaya utama melindungi masyarakat. Inovasi masif ini terwujud dalam Kampanye KataBPOM pada Senin (4/11/2024) melalui kemitraan strategis dengan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Kegiatan yang dibuka di Stasiun Juanda oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dan Direktur Utama PT KCI, Asdo Artriviyanto, ini secara strategis memanfaatkan Commuter Line yang memiliki hampir satu juta pengguna setiap hari. Dengan menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) kataBPOM di 214 gerbong KRL dan mendistribusikan modul literasi, kolaborasi ini berhasil menjangkau masyarakat secara luas dan masif di tengah mobilitas tinggi. Skala jangkauan yang luas ini secara signifikan memperkuat peran BPOM dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) melalui peningkatan kesadaran publik.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Penerapan ISO

Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM merupakan mandat vital untuk memastikan standar mutu ISO 9001:2015 tidak hanya diterapkan, tetapi juga dievaluasi secara berkelanjutan agar layanan dan efektivitas pengawasan tetap tajam dan relevan demi menjaga kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan klausul 9.3 standar sistem manajemen, kegiatan ini dilakukan secara periodik untuk menguji kesesuaian dan kesinambungan sistem. Komitmen BPOM terbukti solid, di mana hasil closing-meeting audit eksternal oleh PT Sucofindo pada 28 November 2024 merekomendasikan seluruh Unit Kerja untuk memperoleh atau mempertahankan sertifikasi. Keberhasilan ini menegaskan konsistensi BPOM dalam mencapai kualitas manajemen global, yang kemudian diakui melalui penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh Kepala BPOM selaku Manajemen Puncak kepada Sekretaris Utama.

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Interoperabilitas Data Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM mengimplementasikan interoperabilitas data dengan sejumlah kementerian dan lembaga melalui portal Satu Data BPOM untuk mendukung pertukaran dan integrasi data pengawasan obat dan makanan. Salah satu bentuk kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, mencakup pertukaran data uji klinik, data balik Kamus Farmasi & Alat Kesehatan (KFA) pada platform Satu Sehat, data efek samping, informasi sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), data harga netto apotek (HNA) dan harga eceran tertinggi (HET), serta data produk obat , obat tradisional, obat kuasi dan suplemen Kesehatan yang telah teregistrasi di BPOM. Selain itu, kerjasama interoperabilitas data juga melibatkan Kementerian dan Lembaga yang lain seperti Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Interoperabilitas tersebut mendukung efisiensi, akurasi dan otomatisasi proses tanpa perlu pengisian data berulang

BPOM juga mengintegrasikan data keamanan vaksin dari Web Keamanan Vaksin dan data efek samping obat tuberkulosis dari aplikasi SITB. Di lingkungan internal, pertukaran data antar unit dan UPT juga dioptimalkan. Data yang dikelola oleh Pusdatin (wali data), dengan kontribusi dari seluruh unit teknis BPOM selaku produsen data, kemudian diolah dan divisualisasikan untuk dukungan kebijakan.

Selain itu, untuk menandai langkah strategis dalam mendukung transformasi digital sektor kesehatan, BPOM yang ikut serta dalam KKSK (Komite Kebijakan Sektor Kesehatan) triwulan III melaksanakan koordinasi terhadap interoperabilitas data antara BPOM dengan Kementerian Kesehatan. Data yang dipertukarkan termuat dalam Project Charter Interoperabilitas Data BPOM dan Kementerian Kesehatan pada Rapat Koordinasi KKSK di triwulan III.

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Implementasi BPOM Command Center (BCC)

BPOM Command Center (BCC) merupakan sistem informasi strategis yang menyajikan dashboard interaktif dan dapat diakses secara real time. BCC dibangun untuk mendukung kebutuhan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis BPOM secara komprehensif dan real time. Dashboard BCC menampilkan data dan informasi strategis yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (PUSDATIN) sebagai unit pengelola sistem. Pengembangan BCC ini sejalan dengan inisiatif Satu Data BPOM, yang mendukung implementasi Satu Data Indonesia dan tersimpan dalam repositori data terstandar melalui Data Lake BPOM sebagai sumber utama.

Informasi yang tersedia di BCC dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu Layanan Publik, Pengawasan Obat dan Makanan serta Dukungan Kebijakan. Sampai dengan saat ini BCC sudah menyumbang informasi visualisasi data untuk mendukung kebijakan melalui perkayaan data yang terus menerus dalam datalake yang akan divisualisasikan di BCC.

Selain itu, dalam rangka pemanfaatan informasi yang efektif dan efisien, BCC juga menerima kunjungan internal dan eksternal BPOM. Kunjungan tersebut terdiri dari beberapa pihak seperti Instansi pendidikan, Instansi pemerintah, Media, Masyarakat, dan Pelaku Usaha.

Instansi pemerintah : Kunjungan Menteri, Gubernur, Komdigi, dll
Instansi Pendidikan : Kampus atau Sekolah-Sekolah
Media : Stasiun TV
Masyarakat : LSM, Lembaga atau Organisasi Non Pemerintah, dll
Pelaku usaha

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPOM merupakan bagian integral dari pelaksanaan SPBE nasional. Badan POM berkomitmen dalam melaksanakan SPBE berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, komitmen ini diwujudkan dengan pelaksanaan dan reviu terhadap Keputusan Kepala BPOM Nomor 217 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE di Lingkungan Badan POM yang ditetapkan pada 16 Agustus 2024. Hasil reviu yang telah dilaksanakan menghasilkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 335 Tahun 2025 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE yang ditetapkan pada 4 Juni 2024.
Selaras dengan prinsip SPBE yang berorientasi pada layanan terpadu dan berfokus pada pengguna, BPOM menargetkan pengembangan portal layanan terpusat. Portal ini akan mencakup berbagai fitur yang mendukung ekosistem digitalisasi pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh dan terintegrasi sesuai dengan Arsitektur To Be yang telah dirancang pada tahun 2025.

BPOM **Peringkat 1**
Kategori Lembaga
Nilai SPBE BPOM
4.53
(Naik 0.45 dari 2023)
Penilaian Tahun 2024: Agustus - Oktober

Penilaian Indeks SPBE
dilakukan dalam **2 tahap**:
1. Penilaian Mandiri (Pengisian LKE)
2. Evaluasi oleh KemenpanRB

Penerapan ISO

BPOM berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar internasional ISO/IEC. Komitmen ini diwujudkan melalui perolehan dan penerapan empat sertifikasi ISO, yaitu

1. **ISO/IEC 27001:2022**
   Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2. **ISO/IEC 20000-1:2018**
   Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. **ISO 37001:2016**
   Sistem Manajemen Anti Penyuapan
4. **ISO 9001:2015**
   Sistem Manajemen Mutu

BPOM mengintegrasikan standar-standar tersebut dalam pengelolaan TIK secara menyeluruh. Pada tahun 2024 dilaksanakan audit surveilans baik internal maupun eksternal untuk ISO/IEC 20000-1:2018 dan ISO/IEC 27001:2022.

Selanjutnya pada tahun 2025 telah dilaksanakan resertifikasi audit ISO/IEC 27001:2022. Hasil audit menunjukkan bahwa BPOM berhasil mendapatkan rekomendasi dan mempertahankan Sertifikat ISO/IEC 27001:2022. Pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam penerapan sistem manajemen layanan dan keamanan informasi yang efektif.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data

Sebagai bentuk dukungan terhadap mandat Presiden dalam percepatan transformasi digital serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BPOM telah sepenuhnya memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BPOM menjadi salah satu kementerian/lembaga pionir yang berhasil melakukan migrasi 100% sistem informasi dan aplikasi dari pengelolaan mandiri ke layanan PDN. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur TIK nasional. Sebagai tindak lanjut dalam memperkuat implementasi SPBE, BPOM juga mengadopsi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai penghubung utama antara BPOM dan PDN Kementerian Kominfo, yang mendukung konektivitas lebih aman dan andal serta memastikan kelancaran operasional sistem informasi secara terintegrasi.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya, BPOM telah memaksimalkan infrastruktur TIK yang ada. Penggunaan CPU mencapai 74% dari 2.220 VCPU, penggunaan memory 63% dari 9.494 GB, dan storage hampir penuh dengan pemakaian 99% dari 1.012.231 GB. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas sistem telah digunakan untuk mendukung operasional aplikasi dan layanan.

Selain itu, pemakaian JIP tercatat sebesar 29,40 Mbps dari kapasitas maksimum 30 Mbps, yang berarti mencapai 98% dari total kapasitas jaringan. Meskipun performa sistem berjalan optimal, hal ini menandakan bahwa kapasitas yang tersedia mendekati batas maksimum. Oleh karena itu, pengelolaan dan perluasan kapasitas infrastruktur TIK perlu mendapat perhatian lebih untuk menjaga kelancaran operasional ke depan.

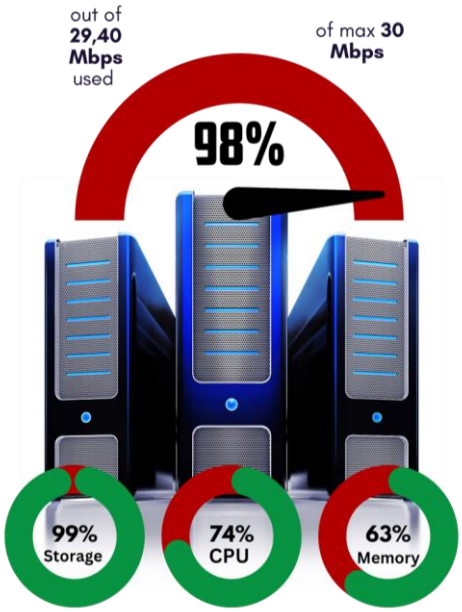

Indeks Tata Kelola Pengadaan BPOM

Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 aspek yaitu kelembagaan, SDM, proses, dan sistem informasi. Hasilnya nilai kematangan UKPBJ BPOM telah mencapai angka maksimal yakni 40,00 sejak 2022. Hal ini tak terlepas dari kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ yang menduduki posisi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa). Selain itu, pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Pengadaan Reagensia Pengujian

Laboratorium merupakan backbone pengawasan obat dan makanan. Untuk itu penyediaan reagen baku pembanding menjadi sangat krusial guna memberikan kelancaran dalam proses pengujian di laboratorium. Karena itu, BPOM melakukan konsolidasi reagensia untuk mendukung ketersediaan reagen.

Acetonitrile HPLC: digunakan dalam HPLC sebagai pelarut untuk uji kandungan zat adiktif, identifikasi metabolit, analisis sediaan obat, uji residu pestisida, identifikasi kontaminan, dan analisis kandungan nutrisi.

Methanol HPLC: digunakan dalam HPLC sebagai pelarut berbagai senyawa untuk menganalisis kadar zat aktif dalam obat seperti paracetamol, atau analisis kandungan asam salisilat dalam kosmetik seperti krim anti jerawat.

Ethanon Absolute For Analysis: digunakan untuk melarutkan bahan kimia dalam obat (bahan aktif & bahan tambahan) maupun kontaminan yang penting dalam proses ekstraksi, pemurnian, dan analisis senyawa dalam sampe obat.

Chloroform For Analysis: digunakan untuk mempelajari struktur dan sifat senyawa organik, memisahkan dan mengidentifikasi komponen campuran, dan mengukur kandungan lipid dalam suatu sampel.

Hydrochloric Acid For Analysis 37%: digunakan untuk melarutkan sampel obat dan makanan, terutama sampel padat seperti tablet, kapsul dalam pengujian kualitas produk.

Nitric Acid For Analysis 65%: digunakan untuk melarutkan dan memecah sampel obat dan makanan agar dapat dianalisis lebih lanjut dan analisis kuantitatif.

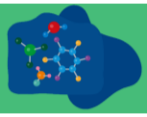

Ethanol Absolute For Analysis: dugunakan untuk melarutkan zat kimia dalam proses ekstraksi, pemisahan, dan pengukurannya.

n-Hexane: digunakan untuk mengekstraks senyawa non-polar, seperti minyak nabati serta untuk menguji toksisitas senyawa dalam sampel obat dan makanan.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Penghargaan Kearsipan

Pada hari Rabu, 22 Januari 2025 dilakukan penyerahan Penghargaan oleh Sestama BPOM kepada tiga unit terbaik yang memperoleh nilai tertinggi pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada beberapa Unit Kerja Pusat Terbaik, UK II Terbaik dan UK III Terbaik. Untuk kategori Unit Kerja Pusat Terbaik, terbaik pertama diraih oleh Inspektorat II. Terbaik kedua diraih oleh unit kerja Biro Sumber Daya Manusia dan Terbaik ketiga diraih oleh Direktorat Cegah Tangkal. Pada kategori Unit Kearsipan II, Terbaik pertama diraih oleh Balai Besar POM Jogjakarta, Terbaik II diraih oleh Balai Besar POM Surabaya dan Terbaik III diraih oleh Balai Besar POM di Bandung. Pada kategori unit Kearsipan III, Terbaik pertama diraih oleh Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Terbaik kedua diraih oleh Loka POM Kabupaten Tabalong dan Terbaik ketiga diraih oleh Loka POM di Kabupaten Belitung.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Forum Komunikasi Registrasi Obat

Pada hari Kamis, 21 Agustus 2025, Direktorat Registrasi Obat menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Registrasi Obat BPOM bersama Industri Farmasi untuk memberikan pemahaman yang sama tentang bisnis proses registrasi obat generik, update regulasi, serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh industri farmasi sehingga dapat menjamin ketersediaan obat generik yang memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu.

Pada kesempatan ini, forum komunikasi dikemas dalam bentuk talkshow sebagai acara Bintang Kelas (Bincang-Bincang Tentang Ketentuan yang Berlaku di Registrasi Obat) dengan narasumber Bapak Deputi dan penanggap dari GPFI, Direktur Standardisasi Obat NPPZA serta Direktur Registrasi Obat sebagai moderator. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh industri farmasi di Indonesia baik secara luring maupun daring.

Direktorat Registrasi Obat senantiasi berkomitmen mendukung percepatan akses obat yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat Indonesia.

Penyambutan CASN BPOM TA 2024 dan Dialog Interaktif Bersama Dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Mei 2025 di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM Pusat. Sebanyak 1.088 CASN hadir secara luring dan daring menyambut rangkaian kegiatan penyambutan yang dihelat terpusat dari Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika. CASN BPOM terdiri dari 511 orang di BPOM pusat (357 CPNS dan 154 PPPK) serta 577 orang di unit pelaksana teknis (UPT) BPOM (384 CPNS dan 193 PPPK). Jumlah ini diharapkan dapat memenuhi komitmen BPOM dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui regenerasi sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar turut ikut hadir secara langsung menyambut kehadiran wajah-wajah baru CASN. Dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa menjadi bagian dari BPOM adalah sebuah pencapaian istimewa, mengingat dari total 26.787 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS), hanya 741 orang atau sekitar 3% yang berhasil lulus dan diangkat sebagai CPNS di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 347 tenaga non-ASN BPOM juga resmi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2024.
Dalam acara ini juga dilaksanakan dialog antara Kepala BPOM dengan para CASN. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman CASN terhadap BPOM menjadi lebih dalam lagi. Selain itu, juga dilakukan pengenalan lingkungan Kantor BPOM Pusat untuk para CASN. CASN juga berkesempatan untuk mengunjungi Laboratorium yang berada di Gedung Eureka. Setelah acara ini selesai, para CASN akan melaksanakan Orientasi sampai akhir bulan Juni 2025.

Memperkuat Peran Strategis BPOM

Dukungan Manajemen

Asistensi regulatory di Surabaya REGULASI, KEPATUHAN, DAN INOVASI

Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung industri farmasi nasional, BPOM memberikan berbagai sertifikat dan surat persetujuan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar/regulasi.

Selain sertifikat CPOB untuk fasilitas radiofarmaka, industri garam farmasi, dan industri farmasi, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menyerahkan sertifikat CDOB kepada PBF di Jawa Timur dan persetujuan izin edar untuk beberapa obat inovatif dan obat generik, Surabaya.

BPOM akan terus berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk memperkuat kepatuhan regulasi dan mempercepat akses obat berkualitas bagi masyarakat. Sinergi ini memastikan obat yang beredar di Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu serta mendorong kemandirian industri farmasi nasional.

Asistensi Regulatori Obat Terpadu Untuk Wilayah Jakarta, Banten Dan Sumatra

Pada tanggal 19-23 Mei 2025, BPOM kembali menyelenggarakan Asistensi Regulatori Obat Terpadu untuk pelaku usaha bidang obat yang ada di wilayah Jakarta, Banten dan Sumatra. Pada kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Pelaku Usaha Mendukung Misi Asta Cita oleh Kepala BPOM, Ketua GPFI DKI Jakarta, Ketua GPFI di Banten, Ketua GPFI di Sumatera Selatan, Wakil Ketua GPFI di Sumatera Utara, Ketua IAI dan Wakil Ketua Asosasi untuk Studi Obat Indonesia . Komitmen ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai Sentra Penelitian Pengembangan Obat dengan Berkontribusi 3 Uji Klinik Setiap Sponsor/ORK.

BAB III.

BAB III.

DUKUNGAN BPOM MEWUJUDKAN UMKM BERDAYA SAING

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

Dukungan BPOM Terhadap UMKM Bagi Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Melalui platform IDEAS (Integrated Development and Training Information System), pelaku usaha dapat mengakses berbagai modul pelatihan dan program pengembangan kompetensi secara digital. BPOM meyakini bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha tidak hanya berkontribusi pada terciptanya produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tetapi juga secara signifikan meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar nasional maupun global.

Teman UMKM Kosmetik

Program TEMAN UMKM Kosmetik digagas sebagai respons atas tingginya temuan pelanggaran penandaan kosmetik. Program ini memiliki 2 pendekatan pembinaan. Pertama pembinaan on site oleh petugas dengan melakukan pemeriksaan rutin di sarana. Kedua pembinaan event biasanya berupa bimbingan teknis. Tujuannya mampu berkontribusi terhadap kenaikan persentase kosmetik memenuhi ketentuan penandaan.

ROADMAP & CAPAIAN PENDAMPINGAN UMK PANGAN OLAHAN

UPT BPOM - Periode s.d. September 2025

KIE & Edukasi

Sosialisasi standar & regulasi keamanan pangan dilaksanakan secara hybrid melibatkan lintas sektor

97,36%
UPT Pelaksana
(74 dari 76 UPT)

Seleksi & Penetapan

Kurasi UMK target pendampingan (Internal & Usulan Lintas Sektor).

97,36%
UPT Pelaksana
(74 dari 76 UPT)

Bimtek CPPOB

Pelatihan teknis 3 hari/3 pertemuan (Pre & Post Test) dengan Kurikulum baku, diskusi, simulasi dokumen Penerapan CPPOB.

98,70%
UPT Pelaksana
(75 dari 76 UPT)

1.218 UMK Terlatih
(178,33% dari target)

Pendampingan Intensif

Kunjungan intensif (min. 4x sebulan) selama 3-4 bulan yang fokus kepada Pembuatan SOP, implementasi mutu, perbaikan sarana.

88,15%
UPT Pelaksana
(67 dari 76 UPT)

710 UMK Didampingi
(103,95% dari target)

Sarana Terbit IP-CPPOB	**418 Sarana** (61,20% dari target)
Total Sertifikat IP-CPPOB	**439 Sertifikat**
Izin Edar (NIE) BPOM MD	**108 Produk**

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

Pendampingan Registrasi Pangan Olahan

Pendampingan registrasi pangan olahan terus dilakukan melalui program jemput bola yang terdiri atas sosialisasi, bimtek, coaching dan desk registrasi, baik secara daring dan luring. HIngga saat ini data menunjukkan persentase izin edar pangan olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar.

Presentase Izin Edar Pangan Olahan Berdasarkan Skala Usaha

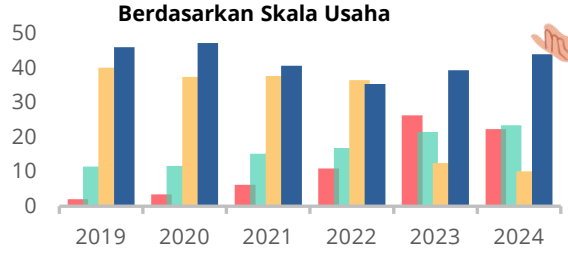

Mikro	2.07%	3.47%	6.26%	11.00%	26.39%	22.40%
Kecil	11.57%	11.68%	15.22%	16.93%	21.59%	23.50%
Menengah	40.23%	37.48%	37.76%	36.61%	12.54%	10,10%
Besar	46.13%	47.36%	40.76%	35.47%	39.48%	44.10%

Pendampingan telah dilakukan terhadap ... pelaku usaha selama tahun 2024 sampai dengan Februari 2025. Telah terbit .... Izin Edar/PB-UMKU dari proses pendampingan registrasi pangan olahan. Pendampingan yang telah diberikan diharapkan dapat mempercepat pelaku usaha mendapatkan izin edar sehingga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha terutama usaha mikro kecil.

Masalah yang dihadapi UMKM

- Kurangnya pemahaman UMKM terhadap persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label
- Gagap teknologi dalam menggunakan aplikasi
- Masih lamanya UMKM memenuhi kekurangan data persyaratan registrasi

Tujuan Pendampingan UMKM

- Mempercepat proses registrasi hingga mendapatkan Izin Edar
- Mendukung pengembangan dan meningkatkan daya saing, terutama untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- Memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi
- Meningkatkan pengetahuan da kopetensi pelaku usaha
- Mengurangi ksalahan dalam pengajuan dokumen

Capaian Pendampingan 2024

No	Skala Usaha	Jumlah
1.	Persetujuan Akun Perusahaan	925
2.	Aju produk yang berproses	2436
3.	Izin Edar/PB-UMKU	3406

Hasil Pendampingan 2024

No	Skala Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Mikro	1485	64,06%
2.	Kecil	473	20,41%
3.	Menengah	139	6,00%
4.	Besar	198	8,54%
5.	Importir	23	0,99%

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

SAPA UMK (Sadar Pangan Aman UMK Pangan Olahan)

Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan berperan strategis dalam menyediakan pangan aman dan berkualitas serta mendorong perekonomian lokal. Untuk meningkatkan daya saing UMK, BPOM menginisiasi program SAPA (Sadar Pangan Aman) UMK. Program ini berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk perguruan tinggi melalui SAPA KAMPUS dan pelaku usaha/lembaga melalui Orang Tua Angkat (OTA).

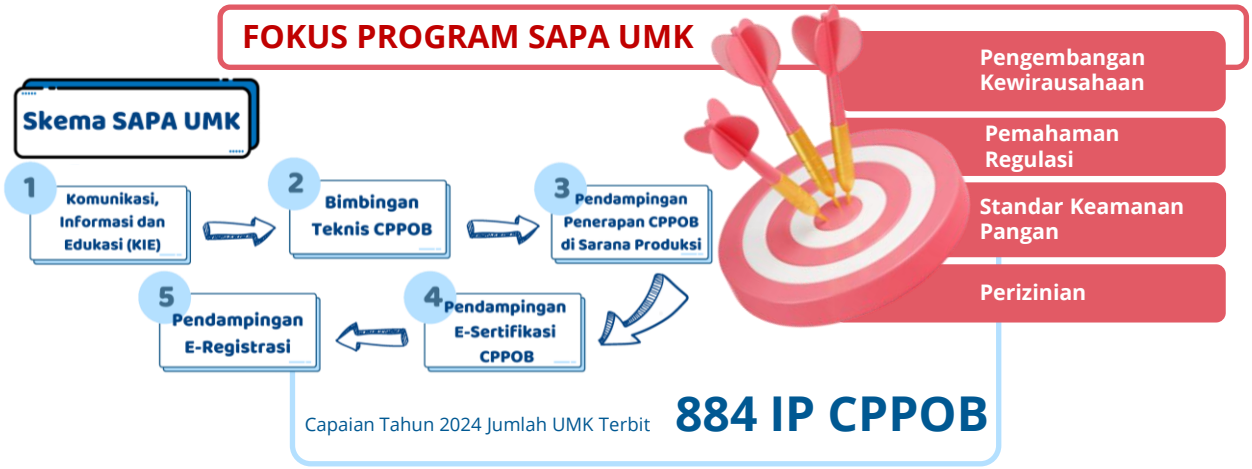

Pemberdayaan UMKM – Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

BPOM meluncurkan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK pangan olahan untuk berkolaborasi bersama mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Program ini mengadopsi 2 pendekatan yakni inclusive closed loop system dan one way system. Hingga saat ini tercatat 27 industri terlibat sebagai OTA.

Badan POM meluncurkan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan. Program ini bertujuan untuk:

- Membantu UMK pangan olahan mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam menyediakan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
- Meningkatkan daya saing serta kemandirian UMK di bidang pangan olahan.
- Memperkuat komitmen pelaku industri pangan olahan dan *stakeholder* lainnya dalam membina dan mendukung UMK pangan olahan.

BENTUK KEGIATAN OTA

- PERMODALAN
- PENYULUHAN
- PENDAMPINGAN
- MAGANG
- PERALATAN PRODUKSI
- PROMOSI DAN PEMASARAN

Inclusive Closed Loop System

Model sistem lingkaran tertutup, OTA memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh anak angkat berupa: modal, bahan baku maupun peralatan untuk diproses atau diproduksi menjadi produk antara yang merupakan bahan baku bagi Industri Orang Tua Angkat.

One Way System

Bersifat satu arah, orang tua angkat menyalurkan atau mengalokasikan sebagian program Corporate Social Responsibility sebagai hibah kepada UMK angkat, tidak ada timbal balik.

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

Penguatan Keamanan Pangan Regional

Pada tahun 2024, Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN Health Cluster 4 (AHC4) untuk periode 2024-2026. Selama periode kepemimpinan ini, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan AHC4 serta berkoordinasi erat dengan ASEAN Secretariat (ASEC) dan koordinator negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Serangkaian acara dalam the 8th Meeting of AHC4 "Ensuring Food Safety" diselenggarakan di Kantor Badan POM RI, Jakarta pada Rabu-Jumat 20-22 November 2024 yang dihadiri oleh 11 anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar, Cambodia, Lao PDR, Thailand, Vietnam, Indonesia serta Timor Leste sebagai observer. Kegiatan tersebut juga dihardiri oleh perwakilan Mitra Kerja ASEAN, European Union, WHO Indonesia, UK Mission to ASEAN, ILSI SEA Region, FAO Thailand, WHO Regional Office for South-East Asia.

BPOM kembali dipercaya menjadi tuan rumah the 9th Meeting of the ASEAN Health Cluster 4 (AHC4) on Ensuring Food Safety, yang digelar secara hybrid dari Jakarta pada 8—10 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Sekretariat ASEAN dan Pemerintah Indonesia, sekaligus menandai kali kedua BPOM menjadi penyelenggara forum kerja sama regional di bidang keamanan pangan. Pertemuan dihadiri seluruh negara anggota ASEAN (ASEAN member state/AMS) dan Timor Leste sebagai observer. Tak hanya itu hadir mitra internasional seperti International Life Sciences Institute (ILSI), Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization (WHO), ASEAN-UK Health Security Partnership (HSP) Programme, European Union Technical Assistance Facility to the Green Team Europe Initiative (TAF GTEI), serta Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO).

Dalam kegiatan tersebut dibahas serangkaian strategi untuk meningkatkan kolaborasi keamanan pangan di ASEAN serta beragam inisiatif keamanan pangan yang akan dilaksanakan bersama dengan Badan ASEAN lainnya di sektor ekonomi dan sektor sosial budaya. Melalui peran strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat standar keamanan pangan, meningkatkan kapasitas regional, serta membangun kebijakan yang mendukung akses terhadap pangan yang sehat, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat ASEAN.

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

Sinergi Lintas Sektor untuk UMK Pangan

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan menggelar kegiatan Forum Koordinasi Nasional Pangam Steril Komersial pada tanggal 22 Oktober 2024 yang menjadi wadah penguatan komitmen bersama lintas sektor untuk berkolaborasi dan mewujudkan inovasi dalam memperkuat kapasitas UMK Pangan Steril Komersial. Kegiatan ini berkolaborasi bersama lintas sektor yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Asosiasi Pangan Steril Komersial, Akademisi dan Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya UMK yang memproduksi kuliner khas Indonesia, penggunaan teknologi sterilisasi komersial dalam pengalengan semakin populer. Teknologi ini tidak hanya memperpanjang umur simpan produk pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Untuk membantu UMK pangan steril komersial dalam memenuhi regulasi yang ditetapkan, BPOM telah melakukan langkah-langkah strategis melalui fasilitasi, supervisi, bimingan teknis, dan pendampingan secara intensif. Bentuk fasilitasi yang dilakukan melalui inovasi, antara lain:

- Pedoman Penggunaan Jadwal Proses Generik untuk UMK Pangan Steril Komersial
- One Stop Digital Solution Web Referensi Informasi bagi UMK Pangan Steril Komersial
- Buku Badan POM Wujudkan UMK Pangan Olahan Maju, Mandiri dan Berdaya Saing

Dukungan BPOM Mewujudkan

UMKM Berdaya Saing

Penguatan Implementasi Fortifikasi Pangan

Visitasi fasilitas industri pangan bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) berjalan optimal sekaligus memperkuat kolaborasi dengan industri pangan olahan dalam mendukung upaya pemerintah mendukung kesehatan masyarakat melalui fortifikasi pangan. Sejak 2022, pemerintah memberlakukan kewajiban fortifikasi tepung terigu dengan zat besi, asam folat, dan zinc untuk mengatasi defisiensi mikronutrien yang berlontribusi terhadap anemia dan stuntinng BPOM sebagai lembaga otoritas pengawas keamanan pangan memiliki peran penting dalam mengawal implementasi fortifikasi tepung terigu. BPOM juga harus memastikan kualitas dan keamanannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satunya dengan melakukan visitasi ke fasilitas produksi Indofood Group pada tanggal 27 Februari 2025. Kolaborasi dengan pelaku industri diharapkan dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri dan membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang.

Dorong Keberlanjutan MBG

Dalam upaya mendukung keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), BPOM terus mendorong kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk industri pangan olahan. Sinergi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pangan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kepala BPOM mengunjungi salah satu sarana produksi pangan olahan yaitu PT Kian Manunggal di Cikarang Selatan pada tanggal 12 Februari 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari monitoring BPOM terhadap industri pangan olahan yang berperan penting sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dukungan dari sektor industri pangan olahan juga menjadi salah satu kunci agar program MBG terus berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pemberdayaan Masyarakat - Inovasi KIE

Konsumsi rokok masih menjadi masalah serius di Indonesia. Prevalensi perokok terus meningkat terutama di kalangan anak dan remaja. Badan POM selain melakukan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik, juga diamanahkan untuk melakukan edukasi tentang bahaya merokok terutama kepada generasi muda. Untuk dapat lebih efektif dalam menyebarluaskan informasi bahaya merokok kepada generasi muda, BPOM telah mengembangkan game edukasi bahaya merokok RIKO sejak tahun 2020 dan setiap tahun dilaksanakan sosialisasi berupa lomba game kepada para pelajar. Pada tahun 2025, BPOM melaksanakan lomba game edukasi ini kepada pelajar Tingkat SMA di wilayah Jakarta. Kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang diperingati setiap tanggal 31 Mei.

Pada kegiatan tersebut Kepala Badan POM dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar generasi muda menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia Sehat Tanpa Rokok. Kepala BPOM juga menegaskan bahwa merokok tidak hanya merusak kesehatan pribadi tetapi juga membebani sistem kesehatan nasional dan menghambat generasi muda untuk maju. Setelah melaksanakan lomba game, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Generasi Muda Sehat Tanpa Rokok Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Kepala Badan, Ibu Deputi, Ibu Direktur, dan perwakilan Siswa/Siswi pelajar tingkat SMA/SMK/Sederajat di wilayah Jakarta.

BAB IV.

PENGUATAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Indeks RB BPOM Tahun 2024

Sejak tahun 2011, BPOM menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) melalui berbagai upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup penyederhanaan struktur birokrasi, percepatan layanan publik, serta penerapan kebijakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja. Komitmen ini dibuktikan melalui peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi BPOM, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

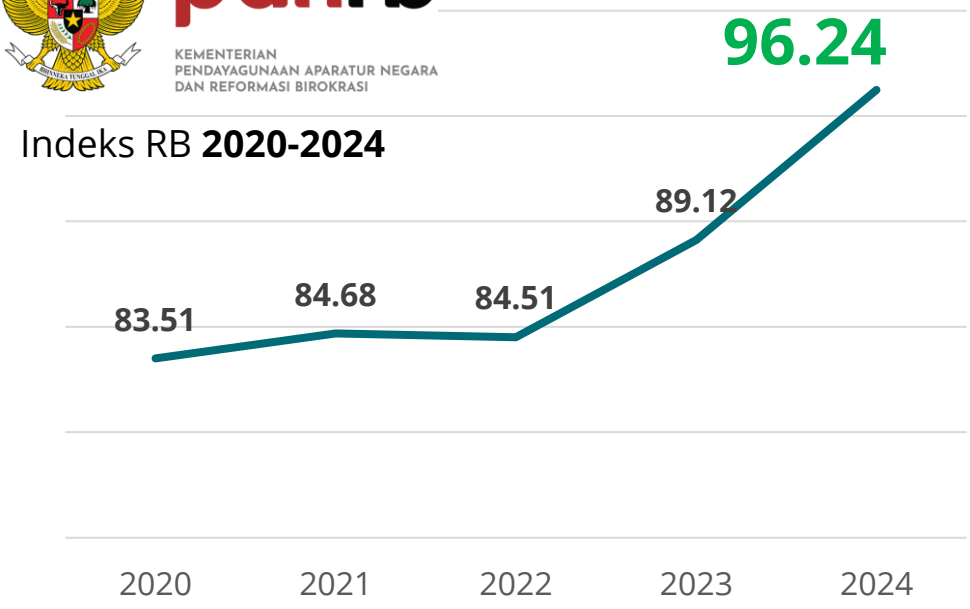

400	Indeks Sistem Merit
82.04	Nilai SAKIP
4.91	Indeks Pelayanan Publik
99.81	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4.53	Indeks SPBE
93.47	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
37	Unit Kerja WBK/WBBM
5	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
77.8	Indeks BerAKHLAK
5	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Pelaporan LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara)

LHKPN Periodik Tahun 2024 dengan hasil total Wajib Lapor (WL) untuk penyampaian LHKPN BPOM tahun 2024 sesuai aplikasi e-LHKPN KPK sebanyak 5.305 (lima ribu tiga ratus lima) WL. Sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 ASN BPOM telah melaporkan 100% LHKAN.

Kewajiban Penyampaian LHKAN

Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Surat Edaran Sekertaris Utama Nomor B-PI.06.09.2.02.25.84 tanggal 5 Februari 2025 tentang Pemberitahua Kewajiban dan Batas Waktu Penyampaian LHKAN Periodik Tahun 2024

Monitoring Kepatuhan
Penyampaian LHKPN

Inspektorat Utama melakukan monitoring

Wajib Lapor (WL) LHKPN BPOM Tahun 2024 sebanyak
5.305 WL

100% Telah Melapor
(sampai dengan 21 maret 2025)

BPOM 100% LAPOR LHKPN

Cafe Integritas Series 4

BPOM menyelenggarakan Café Integritas Seri 4 dengan tema "Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang bahaya judi online serta memperkuat kontribusi mereka dalam menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran BPOM semakin sadar akan risiko hukum dan sosial dari judi online, serta mampu menjaga diri dari potensi kecanduan yang dapat merusak integritas pribadi dan institusi.

"Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya."

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Digitalisasi Pengawasan Intern

BPOM terus meningkatkan efektivitas pengawasan intern melalui integrasi sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko. Aplikasi SIMAKIN (pengelolaan kinerja individu) kini terhubung dengan SAPA APIP (pelaporan manajemen risiko), sehingga profil risiko unit kerja seperti kode risiko dan langkah mitigasinya dapat langsung muncul dalam sistem kinerja. Selain itu juga dikembangkan modul manajemen risiko SAPA APIP dengan fitur baru, seperti identifikasi isu internal-eksternal, pengujian efektivitas pengendalian risiko tinggi, dan pengelolaan risiko eskalasi.

Di sisi lain, karena efisiensi anggaran, BPOM tidak lagi melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu eksternal (ISO) pada 2025. Sebagai gantinya, audit internal akan mengacu pada dokumen manual mutu pengawasan obat dan makanan yang tengah disempurnakan, serta sistem pelaporannya dalam SAPA APIP juga disesuaikan. Selain itu, BPOM mulai menerapkan konsep Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) dengan memanfaatkan dashboard baru dalam aplikasi BCC (BPOM Command Center). Visualisasi ini membantu memetakan bottleneck proses, memperjelas posisi kinerja UPT, dan menjadi langkah awal menuju sistem pengawasan berbasis data real-time yang lebih transparan dan responsif.

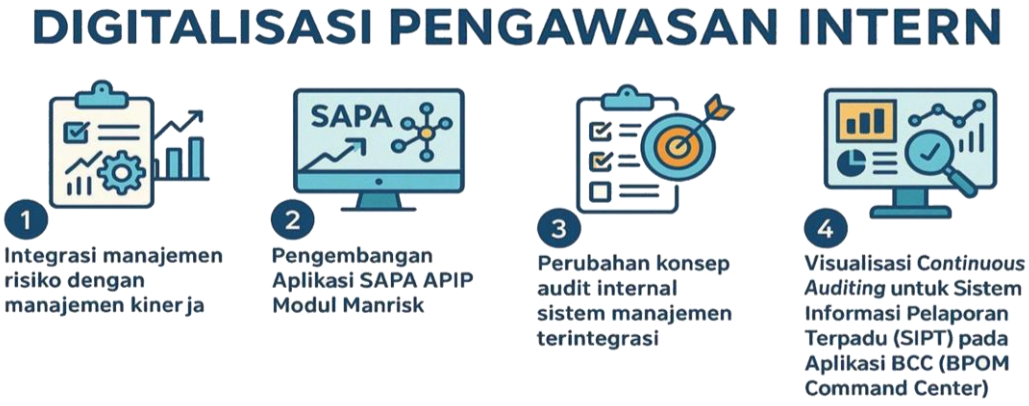

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan 15 Aksi Stranas PK untuk periode 2025–2026. BPOM berperan aktif dalam dua fokus rencana aksi, yaitu Penguatan Tata Kelola Impor dan Digitalisasi.

Perbaikan tata kelola impor, khususnya di sektor pertanian, industri, dan kesehatan, terus didorong sebagai langkah pencegahan korupsi yang sistematis. Di sektor kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Lembaga National Single Window (LNSW) bersinergi mengembangkan integrasi sistem, yaitu SSm Perizinan (LNSW), e-Pharm (Kementerian Kesehatan), dan Exim (BPOM). Sistem ini dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola perizinan ekspor-impor komoditas Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, serta menjadi bagian dari aksi prioritas dalam Stranas PK.

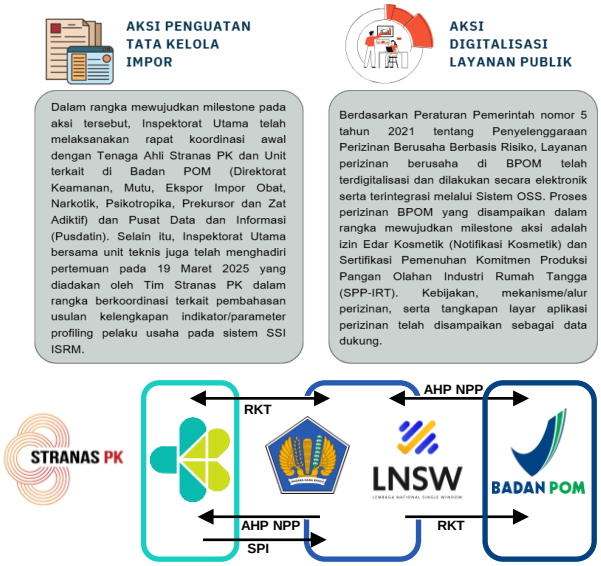

BAB IV.

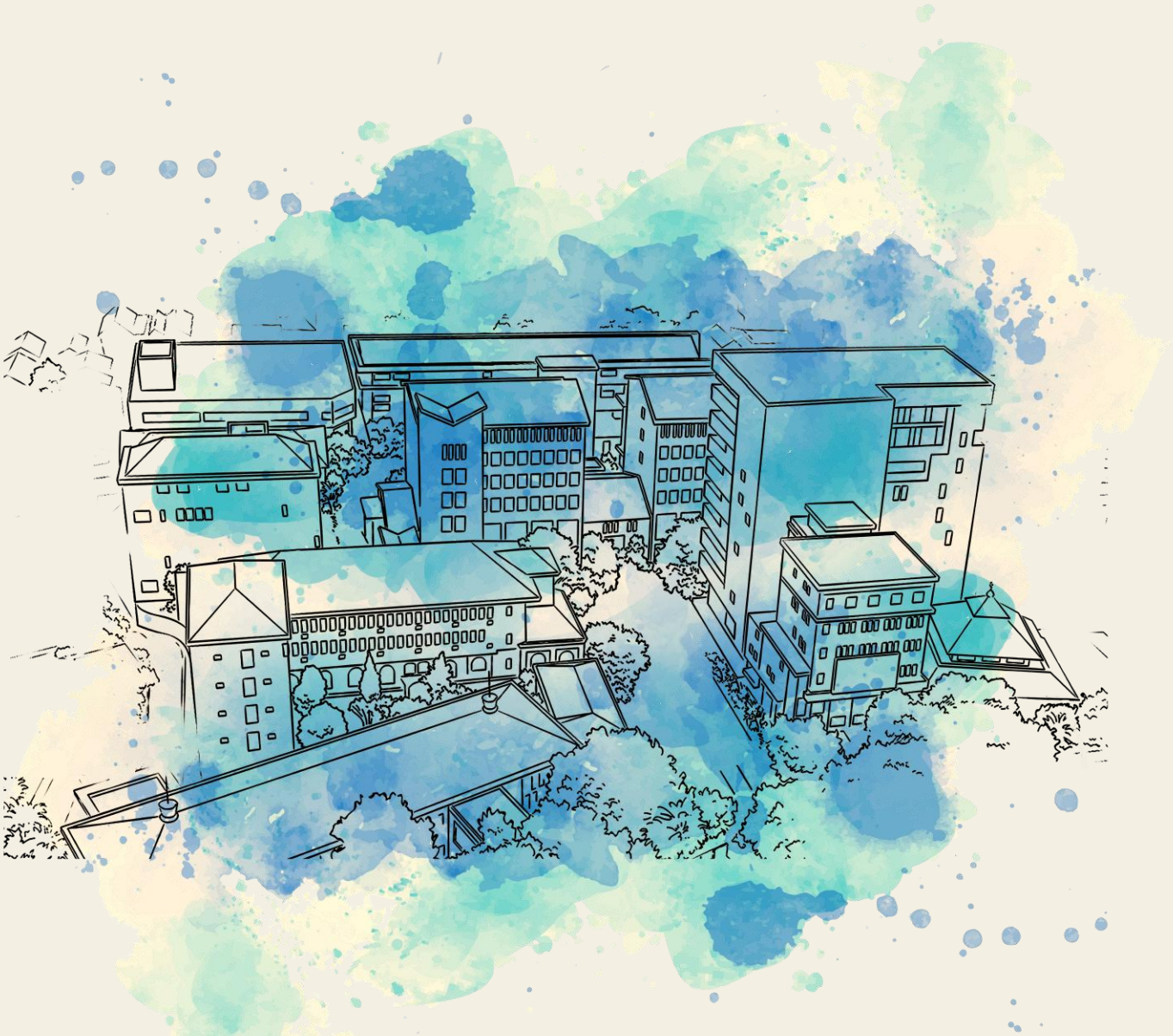

STRATEGI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KEDEPAN

UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan Kedepan

Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

BPOM Mobile

BPOM terus mendorong inovasi dalam menciptakan solusi yang tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah melalui inovasi "Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman".

Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memverifikasi legalitas dan keamanan produk obat, makanan, kosmetik, serta suplemen kesehatan melalui pemindaian 2D Barcode atau memasukkan nomor registrasi yang tertera pada kemasan. Fitur pelaporan juga tersedia jika ditemukan produk yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM.

Inovasi ini telah diimplementasikan sejak tahun 2018 dan memenuhi prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hingga aspek keberlanjutan program. Kehadiran BPOM Mobile menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

BPOM terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah melalui inovasi: *Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman*

Melalui aplikasi **BPOM Mobile**, masyarakat dapat dengan mudah memverifikasi **keamanan dan legalitas** produk obat, makanan, kosmetik, serta suplemen kesehatan, cukup dengan **memindai 2D barcode** atau **memasukkan nomor registrasi produk** yang tertera pada kemasan. Pengguna juga dapat **melaporkan produk yang mencurigakan** langsung melalui aplikasi.

Diluncurkan sejak **2018**, inovasi ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan BPOM, baik dari sisi **kebijakan dan regulasi**, **kesesuaian dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, maupun dari sisi **program keberlanjutan** serta **manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.**

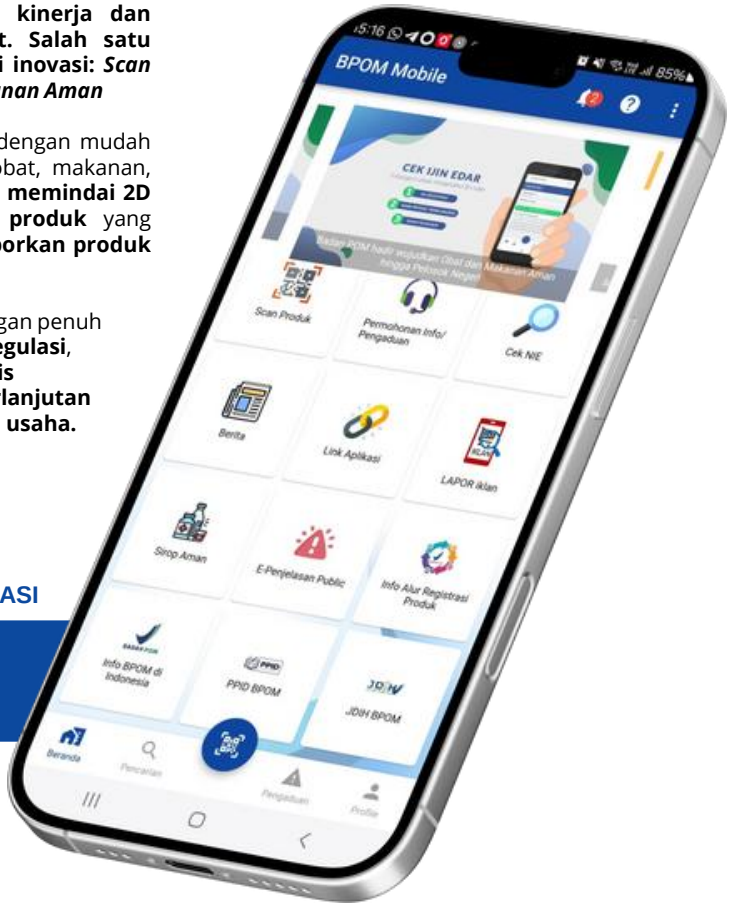

KELOMPOK KEBERLANJUTAN INOVASI

TOP 5

Tahun 2024

Pencapaian
1 TAHUN KERJA
Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D

DARI AKAR NUSANTARA MENUJU PANGGUNG DUNIA

Prof.dr.Taruna Ikrar, M.D., M.Biomed, Ph.D